



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 5 TAHUN 2011

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011-2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah untuk menentukan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan
 - b. bahwa Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah dan pedoman sekaligus menjadi acuan bagi seluruh kegiatan pengelolaan pembangunan yang hendak dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raujua Tahun 2011-2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 84 Tambahan Lembaran Nomor Nomor 4739);
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 493);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana

Kerja Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara , Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 seri E 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 001 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3).
28. Peraturan daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
dan
BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011-2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Provinsi adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011– 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Rencana Strategi satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD adalah Dokumen Perencanaan Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD Adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
13. Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum tentang arah yang akan dituju melalui upaya yang akan dilaksanakan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2011.
15. Misi adalah kebijakan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi daerah.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJM Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi dan Program Bupati yang mengacu pada RPJP Daerah memperhatikan RPJMN, RPJM Provinsi, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Penjabaran dari RPJMD akan ditindaklanjuti dengan RENSTRA SKPD dan Penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditandatangani di Seba
pada tanggal 25 Agustus 2011
BUPATI SABU RAIJUA, *fu*
MARTHEN L. DIRA TOME

The seal is circular with a double border. The outer ring contains the text 'BUPATI SABU RAIJUA' at the top and 'SABU RAIJUA' at the bottom, separated by two stars. The center features the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia.

Diundangkan di Seba
pada tanggal 5 September 2011

PI. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA, *CK*
JULIUS ULY

The seal is circular with a double border. The outer ring contains the text 'PI. SEKRETARIS DAERAH' at the top and 'KABUPATEN SABU RAIJUA' at the bottom, separated by two stars. The center features the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011-2016

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur dalam peraturan daerah. Tujuan yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah RPJMD 2011-2016 adalah sebagai arah dan tujuan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah di Kabupaten Sabu Raijua.

Masyarakat, meskipun terdiri dari berbagai suku, agama dan adat istiadat, namun mempunyai satu tujuan dan satu cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkret mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut. Sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Yang memerintahkan penyusunan RPJMD Nasional dan Daerah yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, sehingga RPJMD Daerah hanya memuat arahan secara garis besar.

Penetapan RPJMD Sabu Raijua dalam masing-masing visi, misi dan Program kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2016 adalah :

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam bentuk program strategis dan berbagai kebijakan dan kegiatan untuk mencapai tujuan;
2. Menyediakan tolak ukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).;
3. Menjamin keselarasan dan konsistensi RPJMD Sabu Raijua dengan dokumen perencanaan pembangunan dengan provinsi NTT dan Nasional;
4. Menjadi pedoman dalam memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
5. Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan untuk meminimalkan penggunaan sumberdaya yang *unrenewable* kepada pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*);
6. Memudahkan semua jajaran aparatur Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sabu Raijua dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur;
7. Meletakkan dasar yang kuat bagi pertumbuhan Kabupaten Sabu Raijua yang

maju, mandiri dan sejahtera di masa depan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh daerah kabupaten Sabu Raijua serta strategis untuk mencapainya. Visi tersebut memperdayakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki kabupaten Sabu Raijua untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka menengah atas dasar amanat UUD 1945. Visi ini merupakan jabaran secara struktural dan berkelanjutan dari visi pembangunan nasional dan visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga perlu dijabarkan secara tegas dalam misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sabu Raijua yaitu:

1. Perencanaan pembangunan daerah yang koordinatif, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang cepat, tepat layanan dan transparan peningkatan jaminan kehidupan masyarakat yang berkeadilan aman dan bermartabat;
2. Meningkatkan dan meratakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan;
3. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
4. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan melalui sektor primer, pertanian yang *quick yielding* dan sektor sekunder dan tersier lainnya
5. Memotivasi dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasi mereka dalam peningkatan kegiatan ekonomi.
6. Peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Sabu Raijua;
7. Membangun dan memelihara infrastruktur untuk menunjang pembangunan;
8. Menata ruang Wilayah Pulau Sabu dan Raijua untuk menjadi pedoman pembangunan wilayah yang tepat sasaran dan tepat guna, dan membangun tataruang kota yang moderen dan asri;
9. Pengembangan seni budaya lokal dan promosi pariwisata.

RPJMD Kabupaten Sabu Raijua telah disusun dengan memperhatikan RPJP nasional tahun 2005-2025 dan RPJP daerah Provinsi NTT 2005-2025 serta sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN
2011 NOMOR 5

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA

TAHUN 2011 – 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

2011

KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sabu Raijua ini dibuat sebagai rancangan program dengan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan di Sabu Raijua selama 5 (lima) tahun ke depan dalam mewujudkan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Kabupaten Sabu Raijua untuk memimpin kabupaten baru ini. Sebagai sebuah kabupaten yang baru berpemerintahan sendiri pada awal tahun 2011 ini, tentu terdapat banyak persoalan yang perlu dibenahi.

Permasalahan penataan staf dari tiap SKPD tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, pembenahan administrasi pemerintahan dan pembangunan, penyusunan anggaran bagi berbagai kepentingan administratif dan pembangunan dan penyelesaian berbagai masalah sosial yang timbul akibat konflik kepentingan dalam proses demokrasi yang baru berlalu merupakan beberapa hal yang perlu diselesaikan. Kami berharap bahwa masalah tersebut di atas akan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita harus bersatu untuk membangun Sabu Raijua. Semua rakyat Sabu Raijua perlu menyatukan semua pikiran dan pendapat secara politis dan sosial budaya untuk dapat melaksanakan pembangunan mengejar kesejahteraan yang tertinggal dan membuktikan kepada masyarakat NTT khususnya dan Indonesia pada umumnya bahwa "Orang Sabu Raijua juga Bisa ..."

RPJMD ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari pikiran awal kami dalam Pemilukada yang lalu berdasarkan Visi dan Misi yang akan kami emban dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dengan bantuan seluruh rakyat Sabu Raijua yang penuh semangat untuk maju dan dengan Berkat dan Rahmat Tuhan yang Maha Kasih itu, program-program ini diharapkan akan menjadi kenyataan. Dengan demikian: motto "Orang Sabu-Raijua Juga Bisa" tidak saja menjadi sekedar seriboyan kosong, tetapi merupakan tekad dan nekad dari orang Sabu Raijua untuk maju setara dengan penduduk kabupaten lain di NTT.

BUPATI SABU RAIJUA

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latarbelakang | 1 |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan | 2 |
| 1.3. Hubungan Antar Dokumen | 5 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 7 |
| 1.5. Maksud dan Tujuan | 6 |
| BAB II: GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH | |
| 2.1. Aspek Geografis dan Demografi | 8 |
| 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat | 15 |
| 2.3. Aspek Pelayanan Umum | 25 |
| 2.4. Aspek Daya Saing Daerah | 37 |
| BAB III: GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN | |
| 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu | 42 |
| 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu | 44 |
| 3.3. Kerangka Pendanaan | 48 |
| BAB IV: ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS | |
| 4.1. Permasalahan Pembangunan | 57 |
| 4.2. Isu Strategis | 58 |
| BAB V: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | |
| 5.1. Visi | 62 |
| 5.2. Misi | 62 |
| 5.3. Tujuan dan Sasaran | 63 |

| | |
|--|----|
| BAB VI: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN | |
| Misi I: | 67 |
| Misi II: | 68 |
| Misi III: | 69 |
| Misi IV: | 69 |
| Misi V: | 70 |
| Misi VI: | 71 |
| Misi VII: | 71 |
| Misi VIII: | 72 |
| | |
| BAB VII: KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | |
| Misi I: | 73 |
| Misi II: | 74 |
| Misi III: | 76 |
| Misi IV: | 77 |
| Misi V: | 78 |
| Misi VI: | 78 |
| Misi VII: | 79 |
| Misi VIII: | 80 |
| | |
| BAB VIII: INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS | 81 |
| | |
| BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH | 82 |
| | |
| BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN | 91 |
| | |
| BAB XI : PENUTUP | 94 |
| | |
| BIBLIOGRAFI | 95 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua sebagai salah satu daerah Otonom di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 26 November 2008 melalui Undang-Undang Nomor. 52 Tahun 2008, untuk itu dalam perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana setiap daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun perencanaan jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Setiap daerah (provinsi/kabupaten/kota) wajib menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2016 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Sabu Raijua, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi dan agenda Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang disampaikan kepada masyarakat dan para wakil rakyat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyusunan RPJMD ini berpedoman pada RPJP Daerah, RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi NTT.

RPJMD Kabupaten Sabu Raijua memuat gambaran umum kondisi daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka pendanaan, isu-isu strategis, arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah, serta indikasi rencana program prioritas, penetapan indikator kinerja daerah, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Berdasarkan pasal 150 ayat 3 huruf e Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan pasal 15 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah agar RPJMD Kabupaten Sabu Raijua tahun 2011-2016 memiliki legitimasi yang kuat dan sejalan arah kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional dan provinsi.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2016 ini tentunya tidak terlepas dari periodisasi kepemimpinan. Kepala Daerah sesuai dengan penekanan dan tema yang didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan perkembangan pembangunan saat itu. Untuk itulah maka penyusunan RPJMD 2011 – 2016 disusun dengan strategi *berkelanjutan dan berkesinambungan* yaitu dengan prinsip tetap

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sabu Raijua adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sabu Raijua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMP), Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2011-2016 yang disesuaikan dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian maka RPJMD Kabupaten Sabu Raijua merupakan dokumen induk yang memuat Arah Kebijakan Pembangunan Daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai stakeholders.

RPJMD Kabupaten Sabu Raijua ini kemudian akan dijabarkan di dalam rencana pembangunan tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (Renja), SKPD serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam RPJMD ini dapat dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga diharapkan proses pembangunan terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJM Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

- **Bab I: Pendahuluan**, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, hubungan RPJM DAERAH dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJM Daerah.
- **Bab II: Gambaran Umum Kondisi Daerah**, berisi tentang kondisi saat ini berkaitan dengan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
- **Bab III: Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan**, berisi gambaran kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan.
- **Bab IV: Analisis Isu-Isu Strategis**, berisi permasalahan pembangunan dan isu strategis.

- Bab V: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisi pernyataan dan penjelasan visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan.
- Bab VI: Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan, berisi strategi serta arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
- Bab VII: Kebijakan Umum dan Program pembangunan Daerah, berisi tentang arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.
- Bab VIII: Indikasi Rencana Program Prioritas, berisi uraian hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD.
- Bab IX: Penetapan Indikator Kinerja Daerah, berisi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.
- Bab X: Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, berisi tentang pedoman transisi untuk menjaga keberlanjutan rencana pembangunan dan kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan.
- Bab XI: Penutup.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

RPJM Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2016, disusun dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan (Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha), dengan tujuan untuk mewujudkan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam pola sikap dan pola tindak.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJM Daerah Sabu Raijua Tahun 2011- 2016 adalah sebagai berikut :

- 2.1. Mewujudkan Visi, Misi Kepala Daerah terpilih dalam bentuk penjabaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Sabu Raijua agar lebih Inovatif, Maju, dan Bermartabat
- 2.2. Menjaga kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah Kabupaten Sabu Raijua selama lima tahun ke depan, 2011-2016.
- 2.3. Mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan buatan yang tersedia secara tepat dan terarah, efektif dan efisien secara berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Sabu Raijua.

- 2.4. Mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu strategis pembangunan yang sedang berkembang, sebagai acuan dalam perumusan arah kebijakan dan perencanaan program pembangunan daerah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
- 2.5. Menetapkan pencapaian sasaran dan target kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, agar terjadi sinergisitas lintas sektor, lintas kegiatan dan pemahaman para pelaku pembangunan.
- 2.6. Meletakkan landasan pembangunan daerah yang kokoh demi tercapainya masyarakat Kabupaten Sabu Raijua yang Inovatif, Maju, dan Bermartabat

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Sabu Raijua terdiri dari 3 pulau besar yaitu Pulau Sabu, Pulau Raijua dan Pulau Dana. Secara geografi Kabupaten Sabu Raijua terletak pada 122°1'2.421"-121°15'55.488" BT dan 10°50'11.745"-10°50'19.558" S LS. Batas geografis Kabupaten Sabu Raijua adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Sabu
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Laut Sabu Sumba Timur
- Sebelah Timur : Laut Sabu Rote Ndao

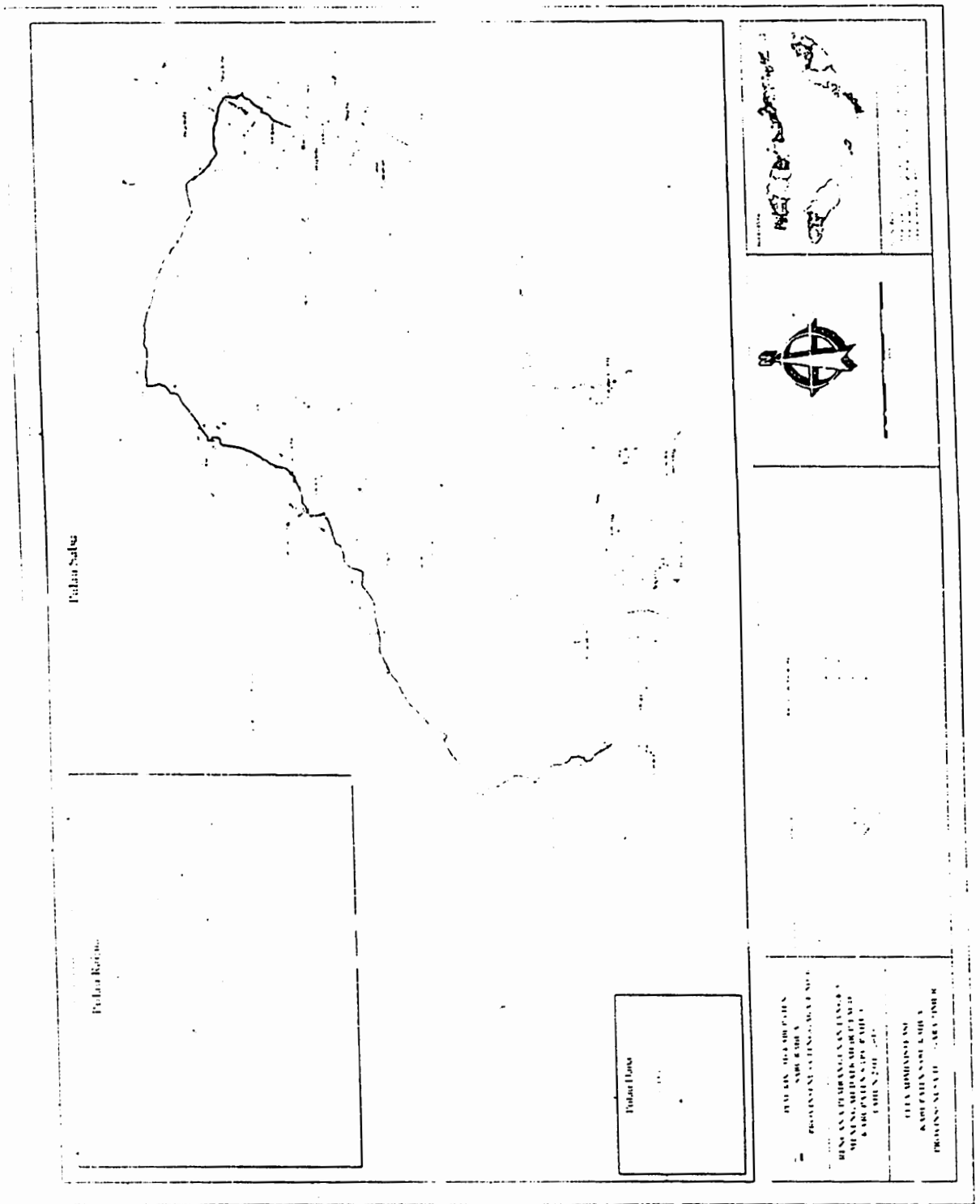
Luas Kabupaten Sabu Raijua 460,84 Km², yang terdiri dari 6 kecamatan dan 5 kelurahan dan 58 desa (lihat Tabel 2.1 dan Gambar 1).

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2011

| No | Kecamatan | Ibukota | Jumlah Desa | Jumlah Kelurahan | Luas Wilayah (Km ²) |
|--------|-------------|----------|-------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | Raijua | Ledeunu | 3 | 2 | 39,05 |
| 2 | Sabu Barat | Seba | 17 | 1 | 185,16 |
| 3 | Hawu Meharu | Tanajawa | 10 | - | 62,81 |
| 4 | Sabu Timur | Bolou | 8 | 2 | 37,21 |
| 5 | Sabu Liae | Eilogo | 12 | - | 57,99 |
| 6 | Sabu Tengah | Eimadake | 8 | - | 78,62 |
| Jumlah | | | 58 | 5 | 460,84 |

Sumber : RTRW Kabupaten Sabu Raijua, 2011

Tabel 2.1. menunjukkan bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Sabu Barat seluas 185,16 Km² dengan jumlah desa terbanyak yaitu 17 desa.



Secara topografi, Kabupaten Sabu Raijua berada pada ketinggian 350 dpl. Wilayah pesisir pantai dan dataran rendah di Pulau Sabu berada pada ketinggian antara 0-100 m DPL. Puncak tertinggi berada di Desa Racnalulu dan Desa Depe kecamatan Sabu Barat, dengan ketinggian kurang-lebih 350 m. Tingkat kelerengan di Pulau Sabu lihat Tabel 2.2)

**Tabel 2.2 Tingkat Kelerengan di Pulau Sabu
Tahun 2011**

| No | Lereng Lahan (%) | Fisiografi | Luas (Km ²) |
|----|------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 0-02 | Datar | 81.07 |
| 2 | 02-05 | Datar Bergelombang | 122.60 |
| 3 | 05-15 | Bergelombang | 203.66 |
| 4 | 15-40 | Curam | 55.52 |

Sumber : RTRW Kabupaten Sabu Raijua

Rata-rata ketinggian tanah di Pulau Raijua antara 0-177 m dpl. Sedangkan puncak tertinggi di Raijua diperkirakan kurang dari 200 meter. Kondisi topografi ini menggambarkan bahwa mayoritas kondisi tanah di Pulau Sabu adalah bergelombang di mana kondisi ini membutuhkan biaya tambahan bagi konstruksi tertentu dalam pembangunan fisik dan infrastruktur lainnya. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi sangat lambat karena topografi yang kurang mendukung sehingga membutuhkan biaya tinggi dan sentuhan teknologi untuk dapat menjangkau seluruh wilayah desa dan dusun dalam upaya membuka keterisolasian wilayah.

Secara geologi sebagian besar formasi batuan di Kabupaten Sabu Raijua adalah formasi Bari yang sangat baik untuk menopang konstruksi bangunan di atasnya. Sedangkan formasi aluvium yang sangat baik bagi pengembangan pertanian sangat minim. (Formasi batuan di Kabupaten Sabu Raijua dapat dilihat pada tabel 2.3). Secara mendasar, tanah Sabu terbentuk dari *Bobonaro Sealy Clay* (tanah liat Bobonaro) yang diselimuti oleh lipatan tanah *Viqueque*. Bagian utara pulau ini ditutupi lapisan karang. Di sebelah timur Desa Raurobo (wilayah Liae) ditemukan juga lapisan lahar yang tipis. Wainwright memperkirakan lapisan ini terbentuk pada jaman pra *Viqueque* (Wainwright, 1972: 2-3). Di pulau Sabu ditemukan juga jenis batuan yang disebut mangan dan terdapat juga semburan kecil dari dalam perut bumi di Liae yang diduga gas alam. Untuk selanjutnya ke depan gejala-gejala ini perlu penelitian teknis geologis untuk menelusuri kemungkinan adanya jenis bahan tambang lain seperti batu dan logam mulia, minyak bumi, gas alam dan lainnya.

**Tabel 2.3 Kondisi Geologi di Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2011**

| No | Formasi Geologi | Luas (Ha) |
|----|-------------------|-----------|
| 1 | Aluvium | 2.511,86 |
| 2 | Batugamping Korai | 16.563,26 |
| 3 | Formasi Bari | 19.356,53 |
| 4 | Formasi Bisane | 1.027,84 |
| 5 | Formasi Noele | 5.481,35 |
| 6 | Formasi Ofu | 1.145,87 |

Sumber : RTRW Kab.Sabu Raijua

Dari aspek hidrologi, Kabupaten Sabu Raijua termasuk dalam Wilayah Sungai Noelmina yang terdiri dari DAS Dekolomi, Dama, Lodeane, Pulahui, Timu, Wadudari, P. Raijua. Daerah Irigasi yang ada daerah irigasi semi tektis (DI Loko Pehape, DI Mapuhaba, DI Depe, DI Menia). Keberadaan sumber air bersih yang dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan air minum warga penduduk berasal dari jaringan perpipaan PDAM, sumur gali, penampung air hujan, mata air dan sungai.

Secara umum di Kabupaten Sabu Raijua memiliki iklim kering (semi aried), yang ditandai dengan musim kemarau yang sangat panjang (Maret – Desember) dan musim hujan yang sangat pendek (Desember–Februari). Data jumlah hari hujan di Kabupaten Sabu Raijua, menunjukkan jumlah hari hujan terbanyak dengan 8 hari hujan sedangkan rata-rata curah hujan yang turun pada 1 (satu) tahun ini, sebanyak 57,33 mm. Pola curah hujan di Sabu dan Raijua tidak banyak berubah. Fox mencatat bahwa pada tahun 1953 curah hujan di Sabu sebanyak 451 mm (29 hari hujan), 1954: 601 mm (42 hari hujan), 1970: 379 mm (14 hh). Sementara itu angka curah hujan melonjak pada tahun 1971 menjadi 1.724 mm (69 hh) karena curah hujan yang sangat deras pada bulan Januari 1971.

Selanjutnya data curah hujan di Sabu dan Raijua tahun 1976-1988 dapat dilihat dalam Tabel 2.4. Temperatur udara di Kabupaten Sabu Raijua memiliki tipe E4 di mana interval waktu musim kemarau lebih panjang dari musim penghujannya dengan temperatur udara berkisar 21⁰ - 34⁰ C. Temperatur udara rata-rata sekitar 26,7⁰ C. Temperatur udara tertinggi 33,7⁰ C terjadi pada bulan Nopember, sedangkan temperatur udara terendah 21,2⁰ C terjadi pada bulan Juli. Rata-rata penyinaran matahari sebesar 49% pada musim hujan dan 82,4% pada musim kemarau.

Tabel 2.4. Curah Hujan di Sabu dan Raijua
Tahun 1976-1988, 2009

| No. | Tahun | Curah Hujan (mm) | Hari Hujan (hari) |
|-----|-------|------------------|-------------------|
| 1. | 1976 | 409 | 29 |
| 2. | 1977 | 777 | 40 |
| 3. | 1978 | 1.215 | 56 |
| 4. | 1979 | 613 | 35 |
| 5. | 1980 | 952,50 | 36 |
| 6. | 1981 | 1.380 | 51 |
| 7. | 1982 | 326 | 29 |
| 8. | 1983 | 1.244,80 | 56 |
| 9. | 1984 | 1.280,10 | 63 |
| 10. | 1985 | 652,20 | 54 |
| 11. | 1986 | 1.501,30 | 65 |
| 12. | 1987 | 834,30 | 89 |
| 13. | 1988 | 1.074 | 91 |
| 14. | 2009 | 1.151,77 *) | 72 *) |

Sumber: Kantor Camat Sabu Barat. 1989.

Catatan: *). Sabu Raijua Dalam Angka, 2010.

Kondisi klimatologi Sabu Raijua, kurang mendukung pengembangan pertanian, walaupun pertanian yang akan dikembangkan adalah pertanian lahan kering. Kecenderungan rendahnya curah hujan di Sabu Raijua menyebabkan luasnya lahan kritis, lahan kering tak tergarap dan rendahnya produktifitas pertanian. Budidaya hortikultura seperti bawang merah, kacang tanah dan beberapa jenis sayuran juga sangat bergantung pada persediaan air sungai, mataair dan dam yang dibangun pemerintah Kabupaten Kupang. Demikian pula halnya dengan budidaya padi sawah.

Oleh karena itu walaupun petani Sabu Raijua gigih dan bekerja keras dengan sumberdaya alam yang terbatas namun pendapatan mereka tetap rendah. Daya jangkau (*span of control*) perencanaan pembangunan yang terlalu panjang dari pusat pertumbuhan Kabupaten Kupang, membuat efek terhadap perubahan sosial (*social change*) dan pertumbuhan pendapatan masyarakat Sabu Raijua rendah. Dengan menjadi daerah otonom, rentang kendali perencanaan dan pengawasan pembangunan makin dekat dengan masyarakat. Kedekatan ini akan memperpendek *span of control* dan mempercepat *social change*.

Penggunaan lahan di Kabupaten Sabu Raijua mayoritas diperuntukkan bagi kawasan budidaya dengan luasan yang belum tergarap atau masih berupa tanah kosong padang rumput adalah 14.207,55 Km² (lihat Tabel 2.5)

Tabel 2.5. Kondisi Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010

| No | Guna Lahan | Luas (Km) |
|----|---------------------|-----------|
| 1 | Bandar Udara | 3,18 |
| 2 | Lembung | 57,93 |
| 3 | Hutan | 3.645,22 |
| 4 | Kebun/Perkebunan | 5.663,93 |
| 5 | Pasir Pantai | 402,47 |
| 6 | Pemukiman | 952,89 |
| 7 | Rawa | 12,61 |
| 8 | Rumput/Tanah Kosong | 14.207,35 |
| 9 | Sawah Irigasi | 571,27 |
| 10 | Sawah Tadah Pujan | 723,01 |
| 11 | Semak/Belukar | 9.555,96 |
| 12 | Sungai/Danau | 284,25 |
| 13 | Tegalan/Ladang | 9.997,95 |

Sumber : RTRW Kabupaten Sabu Raijua tahun 2011

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Dilihat dari kondisi alam, Kabupaten Sabu Raijua memiliki beberapa potensi pengembangan wilayah seperti :

- Potensi kelautan Kabupaten Sabu Raijua berupa rumput laut, ikan laut dalam dan karang laut sebagai daya tarik wisata.
- Adanya potensi kekayaan mineral yang bermutu baik sebagai bahan baku industri
- Adanya potensi pertambangan mangan, batu gamping dan lempung.
- Adanya petunjuk keberadaan cadangan minyak dan gas bumi di Laut Sawu yang belum tergarap dan dikaji sehingga perlu diteliti lebih lanjut agar dapat memajukan perekonomian wilayah Sabu Raijua.
- Berdasarkan RTRW Propinsi NTT, rencana distribusi ruang propinsi yang dialokasikan di Kabupaten Sabu Raijua diarahkan untuk kawasan hutan lindung, kawasan pertanian propinsi (lahan basah, lahan kering, lahan peternakan), perkebunan (dengan komoditi yang dikembangkan adalah kopi, jambu, kemiri, kapuk, jarak, vanili dan pinang), pariwisata dan permukiman.
- Kawasan strategis yang dikembangkan di Kabupaten Sabu Raijua adalah :
 - Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan: pertahanan dan keamanan adalah pulau Dana yang merupakan lima pulau kecil terluar.

- Kawasan strategis propinsi ditinjau dari sudut kepentingan ekonomi lautan adalah SWPLT laut Sawu
- Kawasan strategis propinsi ditinjau dari sudut lingkungan hidup adalah kawasan laut Sawu dan sekitarnya.
- Kawasan pendukung strategis perbatasan sebagai penunjang kawasan strategis nasional perbatasan laut dengan Australia yaitu Kawasan Sabu Raijua sebagai penunjang pula Dana.

c. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Sabu Raijua merupakan kabupaten yang memiliki intensitas kerawanan terhadap :

- Kawasan potensi gempa tektonik meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua.
- Kawasan rawan tanah longsor adalah lahan gundul pada lahan kemiringan lebih dari 40 % di wilayah Kabupaten Sabu Raijua.
- Kawasan rawan banjir meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sabu Barat
- Penyebaran bahaya tsunami pada wilayah pantai Sabu Raijua.

d. Demografi

Jumlah penduduk Sabu Raijua pada tahun 2009 mencapai 91.870 jiwa yang mayoritas bermukim di Kecamatan Sabu Barat. Rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sabu Raijua dari tahun 2000 hingga tahun 2009 sebesar 4,83 % (lihat tabel 2.6).

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Sabu Raijua Tahun 2000, 2009.

| No. | Kecamatan | 2000 (jiwa) | 2009 (jiwa) | Tkt. Per tmbh (%) |
|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 1. | Sabu Barat | 22.695 | 32.449 | 4,78 |
| 2. | Hawu Mehara | 14.062 | 19.058 | 3,95 |
| 3. | Sabu Timur | 12.423 | 10.355 | 5,64 |
| 4. | Sabu Tengah *) | -- | 8.376 | -- |
| 5. | Sabu Liae | 8.295 | 11.892 | 4,82 |
| 6. | Raijua | 6.578 | 9.740 | 5,34 |
| | Jumlah : | 64.050 | 91.870 | 4,83 |

Sumber: Kabupaten Kupang Dalam Angka.

*) Sebelum dibentuk sebagai kecamatan tahun 2002. adalah bagian dari Kec. Satu Timur.

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pertumbuhan penduduk per tahun tertinggi antara 2000-2009 adalah di Sabu Timur sedangkan yang paling rendah terjadi di Hawu Mehara yaitu 3,95% per tahun. Sabu Tengah adalah kecamatan yang baru terbentuk pada tahun 2002.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Gambaran kondisi ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari PDRB yang merupakan total nilai tambah dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan sektor ekonomi di suatu daerah. Pada tahun 2009 PDRB Kabupaten Sabu Raijua atas dasar harga berlaku sebesar 281,02 milyar rupiah, meningkat 13,78 % dari tahun sebelumnya yang bernilai 246,99 milyar rupiah. Sedangkan jika dibandingkan 2 tahun sebelumnya yakni tahun 2007, telah terjadi peningkatan nilai tambah sebesar 26,16 %.

Atas dasar harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Sabu Raijua tahun 2009 mencapai 135,14 milyar rupiah atau meningkat sebesar 5,54 % dari tahun 2008, sedangkan dibandingkan tahun 2007 telah mengalami peningkatan 10,13 %. Meskipun secara total kegiatan yang dihasilkan oleh sektor ekonomi di Kabupaten Sabu Raijua belum mampu menyaingi kabupaten lainnya, namun secara makro telah terlihat perkembangan yang cukup signifikan. Pemekaran menjadi daerah otonomi baru merupakan salah satu stimulator aktifitas perekonomian di daerah ini sehingga nilai tambah aktivitas sektor-sektor ekonomi yang ada mengalami peningkatan.

Pemertanian nilai PDRB Kabupaten Sabu Raijua didominasi oleh nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas pertanian dalam hal ini oleh sub sektor perikanan. Lebih dari setengah nilai PDRB merupakan kontribusi dari sektor ini, namun prosentase peranan ini terlihat semakin menurun terutama disebabkan oleh meningkatnya peranan sektor jasa-jasa khususnya sub sektor jasa pemerintahan umum. Pada tahun 2007 presentase peranan sektor pertanian mencapai 63,15%, namun mengalami penurunan hingga menjadi 57,32 %, sementara sektor jasa-jasa pada tahun 2007 berperan sebesar 7,81 %, pada tahun 2009 telah berkontribusi sebesar 12,32 %. Meningkatnya kontribusi sektor ini, tidak terlepas dari semakin bertambahnya aktifitas pemerintahan di kabupaten baru ini. Sektor perdagangan, hotel dan restaurant merupakan sektor yang berkontribusi tertinggi yang ketiga yakni sebesar 17,97%, diikuti sektor bangunan sebesar 5,81%, sementara sektor-sektor lainnya memberikan kontribusi di bawah 4 %.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan sebesar 5,54 %, melaju lebih cepat dibanding dua tahun

lainnya yakni 4,95 % di tahun 2007 dan 4,35% di tahun 2008. Sebesar 1,63 % berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, 1,61 % dari sektor pertanian dan 1,21 % dari sektor jasa-jasa. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2009, kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restaurant menggeser sektor pertanian yang sebelumnya selalu memberikan kontribusi terbesar bagi laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sabu Raijua.

Secara makro, Pendapatan perkapita yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu wilayah yang merupakan hasil dari kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat pada tahun 2009 mencapai 3,68 juta rupiah dan nilai ini meningkat 10,81% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 7,93 % pada tahun 2008. Namun kondisi ini ironi dengan penambahan prosentase penduduk miskin dari 84% pada tahun 2008 menjadi 87 % di tahun 2009. Data tentang hal ini yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Kupang dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.7. Jumlah Rumah tangga Miskin di Kabupaten Sabu-Raijua
Tahun 2005 dan 2008**

| No. | Kecamatan | Juml. Rt. Miskin | | Juml. Angg. Kelrg | |
|----------------|-------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2005 | 2008 | 2005 | 2008 |
| 1. | Sabu Btu | 3.205 | 4.910 | 26.530 | 20.324 |
| 2. | Hw. Mhr | 3.628 | n.a | 14.304 | n.a |
| 3. | Sabu Timur | n.a | 1.531 | n.a | 5.877 |
| 4. | Sabu Tengah | 1.281 | n.a | 5.677 | n.a |
| 5. | Sabu Liae | 2.272 | n.a | 8.636 | n.a |
| 6. | Raijua | 1.988 | n.a | 6.826 | n.a |
| Jumlah: | | 14.374 | 6.441 | 61.973 | 26.201 |

Sumber: BPS Kabupaten Kupang.
n.a. = Data not available.

Tabel ini menunjukkan bahwa pada tahun 2005 terdapat keluarga miskin di Sabu-Raijua sebesar 14.374 rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga sebesar 61.973 orang (kecuali Kecamatan Sabu Timur karena tidak ada data), atau rata-rata lebih dari empat orang per keluarga. Dari data yang ada antara tahun 2005 - 2008 angka kemiskinan di Sabu Raijua menurun sekitar 18,40% per tahun. Angka ini tidak mewakili Kecamatan Hw. Mehara, Sabu Tengah, Sabu Liae dan Raijua karena ketiadaan data.

Data tahun 2008 tersebut di atas menunjukkan bahwa keluarga miskin di Sabu Raijua berjumlah 26.201 jiwa. Ini berarti pada tahun 2008 masih terdapat 32,26% penduduk Sabu Raijua yang tergolong miskin (belum termasuk penduduk Kecamatan Hawu Mehara, Sabu Tengah, Sabu Liae dan Raijua). Dengan demikian maka program-program pembangunan ekonomi dalam jangka menengah 2011-2016 hendaknya diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat untuk lebih cepat menurunkan jumlah keluarga miskin di kabupaten ini.

Perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Sabu Raijua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua

| Indikator | Kondisi | | | | Perkiraan | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 2007 (000) | 2008 (000) | 2009 (000) | 2010 * (000) | 2011 (000) | 2012 (000) |
| PDRB : | | | | | | |
| Atas dasar harga berlaku | 222.751.880 | 246.988.410 | 281.022.210 | 321.067.875 | 370.833.396,500 | 432.020.906 |
| Atas dasar harga konstan | 122.708.200 | 128.045.350 | 135.138.970 | 1.250.946 | 151.341.119 | 160.724.268 |
| Pertumbuhan ekonomi | 4,96 % | 4,35% | 5,4% | 5,75% | 5,90% | 6,20% |
| Pendapatan perkapita | | | | | | |
| Atas dasar harga berlaku | 2.943.681,71 | 3.171.636,17 | 3.508.433,46 | 3.929.452,20 | 4.518.870,02 | 5.332.266,63 |
| Atas dasar harga konstan | 1.621.597,40 | 1.644.260,34 | 1.687.150,96 | 1.756.324,15 | 1.854.678,30 | 1.986.360,46 |
| Proporsitas penduduk miskin | | 84% | 87% | 85% | 81% | 78% |

Sumber : Bappeda Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011

Keterangan:

* : Angka perkiraan

Secara makro sumberdaya alam (SDA) yang ada di Sabu dan Raijua (seperti juga di daerah lainnya) yang mudah diamati dan sampai sekarang diberdayakan secara tradisional untuk menunjang kehidupan mereka ialah tanah dan air di daratan dan sumberdaya laut. Iklim kering dan tanah yang kurang subur membuat petani Sabu Raijua lebih mengandalkan lahan garapan lahan kering (ladang) dari pada lahan basah (sawah). Lahan kering digarap untuk menanam tanaman bahan makanan pada musim hujan, memelihara ternak dan menyadap lontar yang justru menghasilkan nira pada musim kemarau, selain menangkap ikan dan biota laut lainnya. Pemberdayaan sumberdaya ini adalah sebagai berikut.

(1). Tanaman Bahan Makanan

Hasil yang menonjol dari sumberdaya daratan ialah rira dan gula pada musim kemarau untuk kebutuhan lokal. Sementara itu budidaya pertanian lain seperti padi, jagung, kacang hijau sangat bergantung pada curah hujan dan serangan hama. Kecenderungan menurunnya curah hujan di Sabu-Raijua menyebarkan rendahnya produktifitas usahatani ini. Budidaya hortikultura seperti bawang merah, kacang tanah dan beberapa jenis sayuran juga sangat bergantung pada persediaan air sungai, mataair dan dam yang dibangun pemerintah Kabupaten Kupang.

Sumberdaya yang menjadi penentu dalam management SDA ialah sumberdaya manusia (SDM). Walaupun *less-skilled*, petani Sabu Raijua nampaknya cukup rajin, tangguh dan cekatan memanfaatkan air yang tersedia di bangunan-bangunan pengairan yang difasilitasi pemerintah. Namun pada gilirannya sungai, dam dan bendungan yang ada juga sangat bergantung pada curah hujan. Akibatnya produktifitas tanaman bahan makanan (padi, jagung, kacang hijau), dan palawija lainnya juga rendah. Pada musim sumberdaya ini bisa diberdayakan, mereka garap. Pada musim mereka tak dapat lagi bertani di daratan (musim kemarau) mereka menggarap lontar dan laut. Pada musim angin barat, mereka pergi merantau mencari nafkah di Sumba, Flores, Alor dan Timor. Inilah kegigihan dan ketegaran orang Sabu-Raijua dalam mempertahankan hidup dan berjuang untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik.

Tabel berikut menunjukkan produksi sawah dan ladang di Kabupaten Sabu-Raijua dalam tahun 2008.

Tabel 2.9. Produksi Sawah dan Ladang di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2008

| No. | Kecamatan | Total Produksi (Ton) | | | | | |
|-----|-------------|----------------------|-------------|--------|--------|--------------|--------------|
| | | Padi Sawah | Padi Ladang | Jagung | Sorgum | Kacang Hijau | Kacang Tanah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Sabu Barat | 1.430 | -- | 5.628 | -- | 3.757 | 961 |
| 2. | Hawu Mehawa | -- | 52 | 651 | 1.418 | 1.054 | 131 |
| 3. | Sabu Timur | 181 | 10 | 559 | -- | 179 | 152 |
| 4. | Sabu Tengah | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| 5. | LiaE | 105 | -- | 235 | 17 | 2.279 | 39 |
| 6. | Raijua | -- | -- | 85 | -- | 35 | 10 |
| | Jumlah: | 1.716 | 62 | 7.158 | 1.435 | 7.304 | 1.533 |

Sumber: Kecamatan Sabu-Raijua Dalam Angka, 2009.

Tabel di atas menunjukkan bahwa produksi lahan kering seperti jagung, sorgum, kacang hijau dan kacang tanah lebih menonjol dari pada produksi padi sawah karena rendahnya curah hujan dan supply air untuk pengairan. Sementara itu usahatani padi ladang kurang mendapat perhatian petani Sabu-Raijua, kecuali di Hawu Mehara dan Sabu Timur. Sorgum juga kurang mendapat perhatian dari petani di Sabu Barat, Sabu Timur, Sabu Tengah dan Raijua.

Produksi lahan kering di Kecamatan Raijua menunjukkan angka paling rendah dari semua kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua. Sementara itu data produksi Sabu Tengah tidak tercatat dalam tabel ini. Kemungkinan data kecamatan ini tercatat dalam kecamatan lain karena pemekaran kecamatan. Penyuluhan pertanian perlu ditingkatkan untuk memotivasi petani penggarap lahan kering.

(2). Tanaman Perkebunan

Selain tanaman bahan makanan seperti tersebut diatas, petani Sabu-Raijua juga menanam tanaman kebun lainnya seperti yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.10. Luas dan Produksi Tanaman Kebun di Sabu-Raijua Tahun 2008

| No. | Kecamatan. | Jenis Tanaman | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | | Kelapa | | Lontar | | Kipuk | | Jamb Mete | | Pala | |
| | | Luas (Ha) | Prod. (Ton) | Luas (Ha) | Prod. (Ton) | Luas (Ha) | Prod. (Ton) | Luas (Ha) | Prod. (Ton) | Luas (Ha) | Prod. (Ton) |
| 1. | Sabu Barat | 325 | 260 | 266 | 83 | 52 | 8 | 384 | 34 | 3 | -- |
| 2. | Hawu Mehara | 337 | 239 | 267 | 45 | 51 | 22 | 600 | 39 | -- | -- |
| 3. | Sabu Timur | 124 | 52 | 101 | 21 | 23 | 7 | 176 | 14 | 2 | -- |
| 4. | Sabu Tengah | 91 | 37 | 115 | 18 | 22 | 7 | 187 | 15 | 1 | -- |
| 5. | Sabu LiaE | 201 | 87 | 169 | 28 | 67 | 16 | 590 | 26 | -- | -- |
| 6. | Raijua | 704 | 192 | 15 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Jumlah: | 1.782 | 867 | 933 | 197 | 215 | 60 | 1.937 | 128 | 6 | -- |

Sumber: Kecamatan Sabu Raijua Dalam Angka, 2009.

Produktivitas kelapa dan lontar menurut tabel ini cukup rendah. Kebun kelapa di Sabu-Raijua hanya menghasilkan kurang-lebih hanya 0,50 ton per Ha. Lontar hanya menghasilkan 0,21 ton per Ha sedangkan jambu mete hanya 0,07 ton per Ha. Pala rupanya masih merupakan tanaman baru yang penanamannya masih dalam tahapan awal dan belum menghasilkan. Tanaman ini hanya ada di Sabu Barat, Sabu Timur dan Sabu Tengah.

(3). Peternakan

Selain bertani tanaman bahan makanan, petani Sabu-Raijua juga memelihara ternak secara ekstensif. Populasi ternak di Sabu-Raijua tahun 2008 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.11. Populasi Ternak Menurut Jenis di Sabu-Raijua Tahun 2008

| No. | Kecamatan | Jenis Ternak (ekor) | | | | | | |
|-----|----------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | | Sapi | Kerbau | Kuda | Kambing | Domba | Babi | Ayam/ Bebek |
| 1. | Sabu Barat | 329 | 661 | 396 | 5.418 | 1.031 | 1.615 | 18.317 |
| 2. | Hawu Mehr | 228 | 127 | 64 | 1.309 | 162 | 581 | 1.679 |
| 3. | Sabu Timur | 178 | 218 | 174 | 3.081 | 1.450 | 1.724 | 4.714 |
| 4. | Sabu Tengah | 176 | 349 | 391 | 4.783 | 2.792 | 2.129 | n.a. |
| 5. | LiaE *) | 103 | 209 | 350 | 2.113 | 2.151 | 1.500 | n.a. |
| 6. | Raijua | -- | 63 | 47 | 710 | 59 | 296 | 538 |
| | Jumlah: | 1.014 | 1.627 | 1.422 | 17.414 | 7.645 | 7.845 | 25.248 |

Sumber: Kecamatan Sabu-Raijua Dalam Angka, 2009.

*) LiaE : Data Tahun 2007.

n.a. = data not available

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah ternak yang menonjol adalah kambing, domba, babi dan unggas. Ternak sapi tidak terdapat di Kecamatan Raijua. Sapi dan kuda juga populasinya cukup rendah. Sapi memang merupakan ternak baru yang diperkenalkan pemerintah Kabupaten Kupang di Sabu Raijua, lewat program sapi kopel.

Dulu Sabu Raijua terkenal sebagai daerah pengekspor kuda, tetapi sekarang populasi ternak ini menurun. Mungkin hal ini terjadi karena kekeringan, kurangnya bahan makanan dan serangan penyakit ternak. Motivasi dan dorongan pengembangan ternak ini juga perlu ditingkatkan dan peningkatan upaya pemerintah daerah untuk memberantas penyakit ternak.

Sebenarnya ada suatu pranata budaya orang Sabu-Raijua yang sering terlupakan oleh pemrakarsa inovasi, yaitu *hapo*. Para antropolog menyebutkan gejala sosio-kultural ini sebagai *Anthropomorphis* (seperti layaknya manusia), artinya semua fenomena yang ada di "tanah" Sabu-Raijua adalah berkeluarga. Batu, tanaman, binatang, angin, hujan dan semua yang ada di Sabu Raijua berkeluarga seperti manusia, melahirkan dan dilahirkan. Dalam banyak hal, introduksi inovasi baru di Sabu Raijua terhambat oleh paham ini.

Pranata budaya *hapo* sebenarnya dapat membantu menyelesaikan masalah introduksi inovasi. Seperti introduksi pupuk buatan, aneka jenis bibit pertanian baru, obat pemberantasan hama, bibit ternak baru seperti babi ras dan lainnya perlu dilakukan proses adopsi secara kultural. Proses adopsi inilah yang disebut *hapo*. Contoh yang cukup jelas yang terjadi di Sabu Raijua ialah introduksi rumput laut. Rumput laut

ditolak karena tidak punya hubungan "keluarga" dengan orang Sabu Raijua. Tetapi lewat kegigihan LSM Le Rai yang mengintroduksinya dalam jangka waktu yang cukup lama rumput laut dihapu dan diterima oleh orang Sabu Raijua. Sekarang mereka memperoleh pendapatan yang cukup tinggi dari budidaya rumput laut.

Setelah menjadi kabupaten otonom, tentunya proses akulturasi demikian lebih mudah dilaksanakan. Introduksikanlah berbagai inovasi pertanian dan non pertanian untuk peningkatan produksi dan pendapatan petani Sabu Raijua. Dengan berbasis pada budaya lokal dan kearifan budaya lokal, inovasi tentu mereka terima.

(4). Kelautan dan Perikanan.

(4).1. Produksi Ikan.

Selain menjadi petani lahan kering dan lahan basah di daratan, orang Sabu-Raijua juga menggarap sumberdaya laut. Penggarapan sumberdaya ini dilakukan sebagai pekerjaan utama, pekerjaan sambilan utama atau menjadi nelayan sebagai pekerjaan tambahan. Tabel berikut menunjukkan hal ini.

Tabel 2.12. Jumlah Nelayan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2008

| No. | Kecamatan | Nelayan (orang) | | | Jumlah |
|-----|----------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | Pekerjaan Utama | Sambilan Utama | Sambilan Tambahan | |
| 1. | Sabu Barat | 122 | 248 | 363 | 733 |
| 2. | Hawu Mehura | 17 | 46 | 160 | 223 |
| 3. | Sabu Timur | 157 | 111 | 45 | 313 |
| 4. | Sabu Tengah | 15 | 55 | 62 | 132 |
| 5. | Sabu LiaE | -- | 25 | 175 | 200 |
| 6. | Raijua | 119 | 46 | 160 | 325 |
| | Jumlah: | 430 | 531 | 965 | 1.926 |

Sumber: Kecamatan Sabu-Raijua, 2009.

Tabel ini menunjukkan bahwa hampir 2000 orang di Sabu-Raijua memilih bekerja sebagai nelayan, baik sebagai pekerjaan utama maupun pekerjaan tambahan. Kurang-lebih 20-an % di antara mereka menjadi nelayan sebagai pekerjaan utama sedangkan lebih dari 50% memilih menjadi nelayan sebagai pekerjaan sambilan utama dan pekerjaan tambahan di samping menggarap ladang dan menyadap lontar.

Selain menangkap ikan dengan alat tradisional seperti jala dan pancing, nelayan Sabu-Raijua juga memakai gillnet dan pukot. Gillnet banyak digunakan oleh nelayan Kecamatan Sabu Barat dan Sabu Timur. Sedangkan pukot dan pancing terbanyak digunakan oleh nelayan Sabu Timur. Nelayan yang paling minim alat tangkap ialah nelayan Raijua.

Penggarapan sumberdaya laut juga dilakukan berbasis *cultural wisdom* seperti *pudi dahi* yaitu dengan membuat sejenis kolam dengan pagar batu di laut dangkal pantai.

Kebiasaan lain yang dilakukan bergenerasi ialah mengambil karang laut untuk dibakar menjadi kapur. Kebiasaan ini merusak habitat ikan dan biota laut lainnya dan sangat mengganggu keindahan pariwisata pantai. Sebagai daerah wisata kebiasaan ini perlu dihindari agar pantai Sabu Raijua pulih dalam jangka menengah dan panjang untuk menyediakan wisata pantai yang menarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara.

Di samping alat penangkap tradisional tersebut di atas, pada tahun 2008 nelayan Sabu Raijua juga menggunakan alat bantu melaut seperti perahu kecil, perahu sedang, motor temple dan kapal motor, dimana sebagian besar nelayan Sabu Raijua masih menggunakan perahu-perahu kecil (sampan) dan perahu sedang/besar tak bermotor untuk melaut. Biasanya perahu kecil dan sedang tanpa mesin seperti ini digunakan untuk menangkap ikan di laut dangkal. Namun terdapat juga sedikit kemajuan yang telah dan sedang terjadi dengan hadirnya penggunaan ketinting, motor temple dan kapal motor. Untuk meningkatkan pendapatan nelayan tentunya pembangunan perikanan perlu memperhatikan program peningkatan peralatan melaut, pemeliharaan ikan keramba dan peningkatan kualitas produk ikan yang dipasarkan di luar Sabu Raijua.

Setelah mengetahui alat tangkap dan alat bantu menangkap ikan di perairan Sabu-Raijua maka hasil tangkapan para nelayan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.13. Hasil Tangkapan Ikan dan Non Ikan Nelayan Sabu-Raijua Tahun 2008

| No. | Jenis Ikan | Kecamatan | | | | | |
|-----|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| | | Sabu Barat (Kwintal) | Hawa Mehara (Kwintal) | Sabu Timur (Kwintal) | Sabu Tengah (Kwintal) | Sabu LiaE (Kwintal) | Raijua (Kwintal) |
| 1. | Tuna | 0,70 | -- | -- | r.a | -- | 0,18 |
| 2. | Cakalang | 1,25 | -- | 0,15 | r.a | -- | 1,10 |
| 3. | Tongkol | 8,70 | -- | 1,00 | r.a | -- | 2,70 |
| 4. | Tenggiri | 2,90 | 0,15 | 1,60 | r.a | 0,80 | 1,24 |
| 5. | Kembung | 9,10 | 0,05 | 0,20 | n.a | 0,30 | 3,60 |
| 6. | Selar | 11,25 | -- | 5,41 | n.a | 1,00 | 4,50 |
| 7. | Tembang | 19,70 | 1,70 | 6,30 | n.a | 1,00 | 5,20 |
| 8. | Teri | 0,50 | -- | -- | n.a | -- | -- |
| 9. | Lalosi | 12,10 | -- | 1,50 | r.a | -- | 4,75 |
| 10. | Parang-parang | 6,30 | 0,27 | 1,80 | n.a | 0,30 | 2,40 |
| 11. | Layang | 9,00 | -- | 3,50 | n.a | -- | 2,75 |
| 12. | Terbang | 33,00 | 0,25 | 6,50 | n.a | 1,25 | 11,50 |
| 13. | Nipi | 36,20 | 1,00 | 6,00 | n.a | 0,50 | 9,15 |
| 14. | Kerapu | -- | 1,00 | -- | n.a | 0,50 | -- |
| 16. | Kakap | -- | 0,20 | 3,20 | n.a | 1,30 | -- |
| 17. | Gargahing | -- | 0,10 | -- | n.a | 0,20 | -- |
| | Jumlah: | 150,70 | 4,72 | 37,16 | | 7,15 | 49,07 |

Sumber: Kecamatan Sabu-Raijua, 2009.

Melihat data dalam tabel ini, nampaklah bahwa produktifitas nelayan di Sabu Raijua dalam setahun masih sangat rendah. Peningkatan produktifitas hasil tangkapan dan peningkatan kualitas produk ikan untuk pasar di luar Sabu Raijua perlu dilakukan setelah kedua pulau ini menjadi kabupaten untuk kesejahteraan mereka.

(5).2. Rumput Laut

Pembudidayaan rumput laut yang masuk ke Sabu tahun 80-an membawa angin segar bagi pembentukan pendapatan petani Sabu Raijua. Inovasi yang awalnya ditolak petani-nelayan Sabu-Raijua karena berbentur dengan *local knowledge* dan *cultural wisdom*. Tetapi akhirnya mereka menerima inovasi tersebut setelah diadopsi secara kultural. Sekarang kehidupan ekonomis mereka relatif lebih baik (terutama masyarakat pantai) dari sebelum mengenal rumput laut. Ini pertanda bahwa mereka dapat juga menyesuaikan diri dengan introduksi inovasi baru. Namun mereka membutuhkan pendekatan yang "tepat budaya", perhatian, kesungguhan dan kesabaran para *innovator* dalam introduksi inovasi untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Jumlah petani dan produksi rumput laut di Sabu Raijua dapat diikuti dalam tabel berikut.

Tabel 2.14. Jumlah Pembudidaya dan Produksi Rumput Laut di Sabu Raijua Tahun 2007

| No. | Kecamatan | Pembudidaya (orang) | Jml Kelompok | Prod. Kering (ton) |
|-----|----------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 1. | Sabu Barat | n.a | 389 | n.a |
| 2. | Hawu Mehara | n.a. | n.a | n.a |
| 3. | Sabu Timur | 1.308 | 76 | 151,50 |
| 4. | Sabu Tengah | n.a | n.a | n.a |
| 5. | Sabu LicE | 1.500 | 75 | 520,60 |
| 6. | Raijua | 4.180 | n.a | 1.100 |
| | Jumlah: | 6.988 | 540 | 1.772,10 |

Sumber: Kecamatan Sabu-Raijua, 2009.

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir 7.000 orang Sabu Raijua mendapat pekerjaan baru dan pendapatan dari rumput laut. Rata-rata produksi per-orang adalah sekitar 254 kg rumput laut kering per tahun. Info dari Sabu mengatakan bahwa rumput laut kering dijual dengan harga Rp. 2.000,- per kg. Bila info tadi benar, maka setiap tahun sebanyak 7.000 orang Sabu Raijua masing-masing memperoleh pendapatan tambahan sebesar Rp. 2.282.327,-- Penciptaan lapangan kerja ini tentu sangat bermakna

bagi orang Sabu Raijua dan perlu ditingkatkan dalam program pembangunan selanjutnya.

Pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua tentu perlu mengalokasikan dana untuk mengembangkan program-program pembangunan berbasis masyarakat yang cukup akurat buat penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, untuk bisa tumbuh, berkembang dan menjadi lebih sejahtera. Untuk itu pengelolaan semua dana di Kabupaten Sabu-Raijua mesti bersih dari berbagai praktek korupsi yang menguntungkan segelintir orang tetapi merugikan masyarakat banyak.

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Sabu Raijua secara komposit digambarkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini merupakan indeks komposit dari aspek kesejahteraan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Sebagai kabupaten baru yang sedang membangun dengan berbagai keterbatasan IPM Kabupaten Sabu Raijua masih rendah dari IPM NTT yang tercapai untuk tahun yang sama.

c. Fokus Seni Budaya

Penduduk Sabu Raijua masih cukup kuat mempertahankan dan menjalankan upacara-upacara tradisional yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal. Mereka terbentuk dalam berbagai kesatuan kelompok patrilineal yang disebut Udu (Clan). Tiap Udu terdiri dari beberapa Kerogo (Sub Clan). Clan dan Sub Clan, mendiami daerah yang disebut Rai yang tersebar di Seba (Hebba), Mehara, LiaE, Dimu dan Raijua. Busana tradisional, alat musik, lagu-lagu, berjenis tarian dalam berbagai upacara budaya digelar sebagai bentuk upaya mempertahankan budaya warisan leluhur.

Dalam mitologi ("Sejarah Tuter") Sabu Raijua, kedua pulau ini telah diatur tata ruang wilayahnya pada jaman leluhur Wai Waka. Leluhur ini membentuk tataruang dengan visi permukiman. Jadi yang tercipta adalah kawasan permukiman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada jamannya.

Dalam mitos, leluhur ini mempunyai lima orang anak laki-laki. Mereka adalah leluhur klan (udu) dari tiap *Rai* (daerah/wilayah) "miliknya". *Dara Wai* adalah leluhur dari semua Udu di Hebba (Seba), *Kole Wai* leluhur dari semua Udu di Mehara, *Wara Wai* leluhur semua Udu di LiaE, *Laki Wai* leluhur dari semua Udu di Dimu dan *Jaka Wai* adalah leluhur dari semua Udu di Raijua.

Langkah di atas adalah awal dari pengembangan tata ruang wilayah di Sabu Raijua. Setelah itu Rai di dibagi lagi menjadi Rae. Di dalam Rae inilah orang Sabu Raijua membangun rumah mereka yang membujur timur-barat. Rumah secara asosiatif

1). Pendidikan

➤ Jumlah Sekolah:

Tabel 2.15. Jumlah Sekolah di Sabu Raijua
Tahun 2010

| No. | Kecamatan | TK | | SD | | SMP | | SMA | | SMK | |
|----------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S |
| 1. | Sabu Barat | 0 | 8 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Hawu Mehara | 0 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sabu Timur | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sabu Tengah | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sabu Liae | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Raijua | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah: | | 1 | 15 | 38 | 28 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |

Sumber: Dinas PKPO, 2011.

N = Negeri; S = Swasta.

Tabel di atas menunjukkan bahwa TK atau PAUD di dominasi oleh PAUD swasta, sementara PAUD Negeri hanya terdapat sebuah di Kecamatan Sabu Tengah. Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, SMA dan SMK didominasi oleh sekolah negeri. Hanya terdapat dua unit SMA Negeri, sebuah SMK Negeri dan sebuah SMA swasta di Kabupaten Sabu Raijua. Kondisi ini tentu besar pengaruhnya terhadap peluang bagi generasi muda Sabu Raijua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Sabu Raijua.

➤ Jumlah Guru dan Murid Sekolah Dasar.

Data ini ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.16. Jumlah Guru Sekolah Dasar di Sabu Raijua Tahun 2009

| No | Kecamatan | SD Negeri | | | SD Swasta | | | Jmlh Murid (org) | |
|----------------|-------------|------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|-----------|------------------|--------------|
| | | Jmlh Sklh (unit) | Jmlh Guru (org) | | Jmlh Sklh (unit) | Jmlh Guru (org) | | SD Negeri | SD Swasta |
| | | | PNS | Non PNS | | PNS | Non PNS | | |
| 1. | Sabu Barat | 15 | 109 | 81 | 10 | 45 | 42 | 2.656 | 1.287 |
| 2. | Hawu Mehara | 8 | 64 | 39 | 5 | 18 | 28 | 5.492 | 930 |
| 3. | Sabu Timur | 2 | 21*) | -- | 4 | 54*) | -- | 398 | 670 |
| 4. | Sabu Tengah | 5 | 35*) | -- | 2 | 7*) | -- | 2.848 | 399 |
| 5. | Sabu Liae | 5 | 47*) | -- | 5 | 47*) | -- | 816 | 808 |
| 6. | Raijua | 3 | 41*) | -- | 2 | 23*) | -- | 679 | 507 |
| Jumlah: | | 38 | 318 | 120 | 28 | 194 | 70 | 12.889 | 4.601 |

Sumber: Kecamatan Dalam Angka, 2010

*) Tidak ada pemisahan antara PNS dan Non PNS.

Tabel 2.15 dan 2.16 menunjukkan terdapat 38 unit SD Negeri dan 28 unit SD Swasta. Data Kecamatan Sabu Timur, Sabu Tengah, Liae dan Raijua tidak membuat pemisahan antara guru PNS dan guru non PNS. Di Kecamatan Sabu Barat dan Hawu Mehara terdapat 293 orang guru SD Negeri di mana 120 orang (40,96%) di antaranya masih berstatus guru non PNS. Guru SD swasta di kedua kecamatan ini juga menunjukkan hal yang sama. Dari 133 orang guru SD swasta di Sabu Barat dan Mehara, 70 orang (54,89%) di antara adalah guru non PNS. Data-data di atas tidak menyebutkan apakah mereka berstatus honorer atau lainnya. Untuk penyusunan RKP tahunan data ini perlu diperjelas untuk peningkatan status dan kinerja para guru.

Pada tahun 2009, jumlah murid SD Negeri di Sabu Raijua adalah 12.889 orang. Mereka mengikuti pendidikan pada 38 unit SDN atau rata-rata 339 orang per Sekolah Dasar. Angka perbandingan kasar antara Guru : Murid pada SD Negeri adalah 29,43%, sementara rasio yang sama untuk SD Swasta adalah 17,43%.

Pada tahun 2010, jumlah peserta ujian akhir nasional SD Negeri/Inpres adalah 1.022 orang. Peserta ujian SD Negeri Inpres yang lulus ujian berjumlah 985 orang atau 96,38%. Sementara itu peserta ujian akhir nasional SD Swasta tahun 2010 berjumlah 639 orang, dan peserta ujian yang lulus berjumlah 628 orang atau 98,28%. Prosentase kelulusan ini menunjukkan bahwa tingkat kelulusan SD Swasta lebih unggul dari SD Negeri.

➤ Prosentase Per.uduk Menurut Status Partisipasi Sekolah.

Tabel 2.17. Prosentase Penduduk Menurut Status Partisipasi Sekolah di Sabu Raijua, Tahun 2010.

| No. | Status Pendidikan | Kelompok Umur | | |
|----------|-------------------------|---------------|---------|---------|
| | | 7 -12 | 13 - 15 | 16 - 18 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Tidak/Belum Pernah Sklh | 3,96 | 2,24 | 2,35 |
| 2. | Masih Sekolah | 94,56 | 85,60 | 53,11 |
| 3. | Tidak Bersekolah Lagi | 1,49 | 11,16 | 44,53 |
| Jumlah : | | 100 | 100 | 100 |

Sumber: BPS Kabupaten Kupang, 2011.

Tabel 2.17. menunjukkan bahwa di Kabupaten Sabu Raijua terdapat 3,96% anak usia SD yang tidak atau belum pernah sekolah, 2,24% anak usia SLTP dan 2,35% anak usia SLTA tidak atau belum pernah sekolah. Data ini menunjukkan bahwa terdapat sedikitnya 8,45% anak di Sabu Raijua sedang bertumbuh menjadi orang dewasa yang Buta Huruf. Kemungkinan hal ini terjadi karena ketidakmampuan ekonomis orangtua mereka atau karena jauhnya permukiman dari fasilitas pendidikan.

Hal yang sama ditunjukkan juga dalam kelompok umur penduduk yang tidak bersekolah lagi. Bahkan terdapat 44,53% anak usia SLTA yang tidak melanjutkan sekolah lagi. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian dalam program pembangunan pendidikan di Sabu Raijua.

➤ Jumlah Guru dan Siswa Sekolah Lanjutan.

Tabel 2.18. Jumlah Guru dan Siswa SMP, SLTA di Sabu Raijua Tahun 2010

| No | Kecamatan | Jumlah | | | | | |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|----------------------|------------|-------------|
| | | SMP Negeri | | | SLTA Negeri & Swasta | | |
| | | Unit Sklh | Guru (org) | Siswa (org) | Unit Sklh | Guru (org) | Siswa (org) |
| 1. | Sabu Barat | 5 | 45 | 1.503 | ? | 94 | 1.272 |
| 2. | Hawu Mehara | 3 | 20 | 943 | -- | -- | -- |
| 3. | Sabu Timur | 2 | 15 | 592 | 1 | 32 | 509 |
| 4. | Sabu Tengah | 2 | 15 | 337 | -- | -- | -- |
| 5. | Sabu Liae | 2 | 19 | 559 | -- | -- | -- |
| 6. | Raijua | 1 | 17 | 345 | -- | -- | -- |
| Jumlah: | | 15 | 131 | 4.279 | 3 | 126 | 1.781 |

Sumber: BPS Kab. Kupang, Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2011.

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Sabu Raijua terdapat 15 SMP Negeri dengan jumlah siswa tahun 2010 sebanyak 4.279 orang, dan tidak terdapat SMP Swasta. Semua guru berjumlah 131 orang tanpa klasifikasi guru PNS dan non PNS. Tidak terdapat data terinci tentang guru mata pelajaran untuk semua SMP di Sabu Raijua. Tingkat kelulusan siswa SMP Negeri di Sabu Raijua ditunjukkan dalam tabel berikut.

Terdapat tiga unit SLTA di Kabupaten Sabu Raijua. Dua unit di Kecamatan Sabu Barat dan satu unit di Sabu Timur. Terdapat 126 orang guru yang mengajar di SLTA tersebut. Rasio guru : sekolah adalah 42. Namun tidak ada klasifikasi guru PNS dan non PNS. Sementara itu rasio guru : siswa adalah 14,13.

Tabel 2.19. Jumlah Peserta Ujian Akhir Nasional dan Jumlah Siswa SMP yang Lulus di Sabu Raijua, Tahun 2010.

| No. | Kecamatan | Peserta Ujian (org) | Jmlh yang Lulus (org) |
|---------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 1. | Sabu Barat | 412 | 394 |
| 2. | Hawu Mehara | 200 | 183 |
| 3. | Sabu Timur | 170 | 160 |
| 4. | Sabu Tengah | 100 | 97 |
| 5. | Sabu Liae | 153 | 130 |
| 6. | Raijua | 59 | 59 |
| Jumlah: | | 1.094 | 1.023 |

Sumber : Dinas PKPO Kabupaten Sabu Raijua, 2011, hal. 99.

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kelulusan siswa SMP dalam Ujian Akhir Nasional tahun 2010 di Sabu Raijua adalah rata-rata 93,51%. Kecamatan Raijua unggul dengan record kelulusan 100%.

➤ **Jumlah Siswa SMU Negeri dan SMU Swasta Peserta dan Lulus Ujian Akhir Nasional.**

Jumlah siswa SMU/SMK peserta dan yang lulus dalam Ujian Akhir Nasional 2010 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.20. Jumlah Siswa SMU Peserta Ujian Akhir Nasional di Sabu Raijua, Tahun 2010

| No | Kecamatan | SMU Negeri | | SMU Swasta | |
|----|----------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | Jmlh Peserta (org) | Jmlh Lulus (org) | Jmlh Peserta (org) | Jmlh Lulus (org) |
| 1. | Sabu Barat | 131 | 131 | 231 | 231 |
| 2. | Hawu Mehara | -- | -- | -- | -- |
| 3. | Sabu Timur | 151 | 148 | -- | -- |
| 4. | Sabu Tengah | -- | -- | -- | -- |
| 5. | Sabu L'ae | -- | -- | -- | -- |
| 6. | Raijua | -- | -- | -- | -- |
| | Jumlah: | 282 | 279 | 231 | 231 |

Sumber: Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2011, hal. 103-104.

Tabel di atas menunjukkan bahwa peserta Ujian Akhir Nasional SMU Negeri berjumlah 282 orang, sedangkan yang lulus 279 orang atau 98,94%. Hasil ujian SMU Negeri di Kecamatan Sabu Barat unggul dalam hal ini dengan tingkat kelulusan 100%. Sementara itu peserta Ujian Akhir Nasional SMU Swasta berjumlah 231 orang dan semuanya lulus atau 100%. Hal ini menunjukkan bahwa SMU Swasta di Sabu Barat menggungguli SMU Negeri dalam prosentase kelulusan.

2. Kesehatan

Fasilitas Kesehatan, Paramedis, Kunjungan dan Jenis Penyakit Masyarakat.

➤ Jumlah Fasilitas/Sarana Kesehatan Masyarakat.

Data tentang fasilitas/sarana pemeliharaan kesehatan masyarakat Sabu Raijua dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.21. Jumlah Sarana Kesehatan Masyarakat di Sabu Raijua Tahun 2009

| No. | Kecamatan | Puskesmas | Pusk. Pemb. | BKIA | PolinJes |
|----------------|-------------|-----------|-------------|----------|-----------|
| 1. | Sabu Barat | 1 | 7 | -- | 8 |
| 2. | Hawu Mehara | 1 | 9 | 1 | -- |
| 3. | Sabu Timur | 1 | 9 | -- | 3 |
| 4. | Sabu Tengah | 1 | 6 | -- | -- |
| 5. | Sabu Liae | 1 | 11 | 3 | -- |
| 6. | Raijua | 1 | 4 | -- | -- |
| Jumlah: | | 6 | 46 | 4 | 11 |

Sumber: Sabu Raijua Dalam Angka, 2010.

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa di semua kecamatan masing-masing terdapat satu unit Puskesmas. Di masing-masing kecamatan terdapat juga Puskesmas Pembantu. Puskesmas Pembantu terbanyak terdapat di Kecamatan Sabu Liae, Hawu Mehara dan Sabu Timur. Sementara itu BKIA hanya terdapat di Kecamatan Hawu Mehara dan Sabu Liae, sedangkan PolinJes hanya terdapat di Kecamatan Sabu Barat dan Sabu Timur.

Bila sarana kesehatan tersebut di atas dibandingkan dengan jumlah penduduk 2010, maka tiap Puskesmas melayani lebih dari 12.160 jiwa, Puskesmas Pembantu melayani lebih dari 1.586 jiwa, BKIA melayani 18.240 jiwa dan PolinJes melayani lebih dari 6.632 jiwa. Sediaan sarana kesehatan ini tentu perlu ditingkatkan lagi untuk dapat melayani lebih baik penduduk kabupaten baru ini.

Sebenarnya Sabu Raijua telah mempunyai sebuah Rumah Sakit Tipe D di Ibukota Kabupaten. Tetapi karena belum ada gedung Kantor Bupati, DPRD dan SKPD maka sampai sekarang ruangan di RS ini sebagian masih dipakai sebagai kantor Bupati dan DPRD serta beberapa SKPD. Hanya sebagian kecil ruangan gedung ini dipakai sebagai Rumah Sakit Kabupaten Sabu Raijua.

➤ Tenaga Paramedis.

Jumlah tenaga paramedis di Sabu Raijua dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.22. Jumlah Tenaga Paramedis di Sabu Raijua Tahun, 2009

| No. | Kecamatan | Dokter Umum | Dokter Gigi | Bidan | Prwt | Tenaga Fa'sinasi | Tenaga Sanitasi | Ass. Apoteker |
|-----|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|---------------|
| 1. | Sabu Barat | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | -- |
| 2. | Hawu Mehara | -- | -- | 5 | 3 | 1 | -- | -- |
| 3. | Sabu Timur | | -- | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Sabu Tengah | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- |
| 5. | Sabu Liae | 1 | -- | 3 | 3 | -- | 1 | -- |
| 6. | Raijua | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- |
| | Jumlah: | 4 | 1 | 28 | 19 | 3 | 3 | 1 |

Sumber: Sabu Raijua Dalam Angka, 2010.

Tabel di atas menunjukkan bahwa hanya terdapat empat orang dokter umum dan seorang dokter gigi untuk melayani 81.211 penduduk Sabu Raijua. Mereka berkedudukan di Sabu Barat (Ibukota kabupaten) dan seorang di Kecamatan Liae. Dokter gigi hanya ada di Ibukota Kabupaten. Tenaga bidan terdapat di semua kecamatan dengan jumlah personil terbanyak di Kecamatan Sabu Barat dan Sabu Timur.

Tahun 2009 tenaga perawat terdapat di lima kecamatan kecuali Kecamatan Sabu Tengah. Pada tahun 2010 tenaga dokter umum bertambah menjadi 7 (tujuh) orang yang melayani di semua kecamatan Sabu Raijua. Jumlah perawat umum bertambah menjadi 31 orang dan perawat gigi 11 orang. Tenaga dokter yang ditempatkan di Sabu Raijua adalah tenaga yang *moveable* artinya mereka dengan mudah berpindah dari Sabu Raijua ke kabupaten lain. Semua perawat umum dan perawat gigi menyebar untuk melayani di semua kecamatan (BPS Kab. Kupang, Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2011, hal. 117).

Tenaga faksinasi hanya terdapat di Kecamatan Sabu Barat, Mehara, dan Sabu Timur. Sementara itu tenaga sanitasi terdapat masing-masing seorang di Sabu Barat, Sabu Timur dan Liae. Sedangkan asisten apoteker di Kabupaten Sabu Raijua hanya terdapat seorang di Kecamatan Sabu Timur. Data ini menunjukkan bahwa kehadiran tenaga paramedis ini masih kurang di Kabupaten Sabu Raijua.

Bila jumlah tenaga paramedis yang ada di Sabu Raijua dibandingkan dengan jumlah penduduk 2010 maka rasionya adalah sebagai berikut: dokter : penduduk = 1 : 10.423 orang, perawat umum = 1 : 2.354, perawat gigi = 1 : 6.633,

biden = 1 : 2.596, perawat umum = 1 : 6.633, tenaga faksinasi = 1 : 24.320; tenaga sanitasi = 1 : 24.320; dan asisten apoteker = 1 : 72.960. Perbandingan di atas menunjukkan angka perbandingan yang terlalu tinggi. Angka ini perlu diturunkan dalam rencana pembangunan kabupaten ini sehingga tingkat pelayanan kesehatan menjadi lebih baik dan tingkat kesejahteraan rakyat Sabu Raijua meningkat.

➤ **Jumlah Pengunjung Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.**

Jumlah pengunjung Puskesmas dan Pustu menunjukkan juga berbagai jenis penyakit yang telah dan sedang diderita oleh penduduk Sabu Raijua.

Tabel 2.23. Jumlah Pengunjung Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Sabu Raijua, Tahun 2009

| No. | Jenis Penyakit | Jumlah Pengunjung (orang) | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|
| | | Kec. Sabu Barat | Kec. Hawu Mehara | Kec. Sabu Timur | Kec. Sabu Tengah | Kec. Sabu Liae | Kec. Raijua |
| 1. | ISPA | 9.150 | 7.155 | 4.487 | 1.906 | 1.387 | Na |
| 2. | Infeksi Saluran Pernafasan Bawah | 2.451 | -- | -- | -- | -- | Na |
| 3. | Infeksi Saluran Pencernaan | 1.123 | -- | -- | -- | -- | Na |
| 4. | Malaria | 9.053 | 1.141 | 3.187 | 966 | 603 | Na |
| 5. | Gigi/Mulut | 1.346 | -- | 3 | 96 | 29 | Na |
| 6. | Sistem Otot | 2.123 | 472 | -- | -- | -- | Na |
| 7. | Hipertensi | 946 | -- | -- | -- | -- | Na |
| 8. | Infeksi Mata | 726 | 1.376 | 249 | 136 | 92 | Na |
| 9. | Infeksi Kulit | 2.952 | 2.603 | 700 | 373 | 364 | Na |
| 10. | Alergi | -- | 1.232 | -- | -- | -- | Na |
| 11. | Diare | -- | 511 | -- | -- | -- | Na |
| 12. | TBC | -- | -- | 58 | 60 | -- | na |
| 13. | Infeksi Telinga | -- | -- | 112 | 46 | -- | na |
| 14. | Lain-lain | 2.083 | 2.172 | 3.100 | 1.283 | 1.201 | na |
| 15. | Kecelakaan | -- | 297 | -- | -- | -- | na |
| 16. | Infeksi Saluran Kencing | -- | -- | 54 | 14 | -- | na |
| 17. | Semua Jenis Penyakit | -- | -- | -- | -- | -- | 2.533*) |
| Jumlah: | | 31.953 | 16.956 | 11.950 | 4.880 | 3.676 | 2.533 |

Sumber: Sabu Raijua Dalam Angka, 2010.

*) Semua jenis penyakit di Raijua.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk yang paling banyak mengunjungi fasilitas kesehatan berasal dari Kecamatan Sabu Barat, Hawu Mehara dan Sabu Timur. Penyakit yang paling banyak dikeluhkan oleh pasien kedua kecamatan ini ialah ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Bagian Atas). Penderita ISPA di Sabu Barat bahkan dua kali lipat dari penderita ISPA di Sabu Timur.

Jenis penyakit lain yang menonjol ialah Malaria. Penyakit ini terdapat di semua kecamatan. Di Kecamatan Sabu Barat, penderita malaria hampir 10 kali lipat dari yang ada di Mehara dan hampir tiga kali lipat dari penderita malaria di Kecamatan Sabu Timur. Sementara itu penyakit infeksi saluran kencing hanya terdapat di Kecamatan Sabu Timur dan Sabu Tengah.

➤ Kasus Penyakit Balita.

Sepuluh jenis penyakit yang diderita anak yang berumur di bawah lima tahun (balita) tahun 2010 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.24. Sepuluh Jenis Kasus Penyakit Balita di Sabu Raijua Tahun 2010

| No. (1) | Jenis Penyakit (2) | Jumlah Kasus (3) | % (4) |
|-----------------|---|---------------------|---------------|
| 1. | ISPA | 6.063 | 52,74 |
| 2. | Penyakit Mata | 268 | 2,04 |
| 3. | Penyakit pada Sistem Otot & Jaringan | 124 | 0,94 |
| 4. | Pengikat | -- | -- |
| 5. | Penyakit Lain Pada Saluran Pernafasan | 903 | 6,84 |
| 6. | Bag. Atas | 1.956 | 14,81 |
| 7. | Penyakit Kulit Alergi | 172 | 1,30 |
| 8. | Malaria Tanpa Pemeriksaan Laboratorium | 857 | 6,49 |
| 9. | Infeksi Usus Lainnya | 927 | 7,02 |
| 10. | Penyakit Infeksi Kulit Diare Penyakit Lainnya | 1.033 | 7,82 |
| Jumlah : | | 13.203 | 100,00 |

Sumber: BPS Kab. Kupang, Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2011, hal. 122-123

Tabel di atas menunjukkan bahwa kasus penyakit yang terbanyak diderita oleh anak Balita di Sabu Raijua tahun 2010 adalah Infeksi Saluran Pernafasan Bagian Atas (ISPA). Terdapat 52,74% dari anak Balita yang dibawa orangtuanya ke instalasi kesehatan tahun 2010. Sementara itu tidak diketahui berapa banyak anak Balita yang

menderita penyakit yang sama tetapi tidak di rawat di instalasi kesehatan karena kurang menyebarnya fasilitas kesehatan ke desa-desa terpencil atau karena ketidakmampuan orangtua.

Penduduk usia 0 – 4 tahun (Balita) di Sabu Raijua pada tahun 2010 berjumlah 10.791 orang (BPS Kabupaten Kupang, 2011), sementara itu Balita penderita ISPA berjumlah 6.963 kasus. Bila penderita kasus dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 0 – 4 tahun (Balita) tahun 2010, maka sedikitnya Balita Sabu Raijua yang pernah dirawat karena kasus ISPA adalah sebesar 64,53%. Prosentase ini belum termasuk mereka yang sakit tetapi tidak mengunjungi instalasi kesehatan.

Penyakit lainnya yang banyak diderita Balita ialah Malaria, Diare dan lainnya. Data di atas juga menunjukkan perlunya penyebaran fasilitas pemeliharaan kesehatan dan pembangunan jalur prasarana komunikasi di masa depan untuk menjangkau desa-desa terpencil dan sulit komunikasi.

➤ **Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).**

Jumlah Posyandu, Kader Aktif dan Dukun Bayi dapat diikuti dalam tabel berikut.

Tabel 2.25. Jumlah Posyandu di Sabu Raijua Tahun 2009

| No. | Kecamatan | Posyandu (unit) | | Kader Aktif (org) | | Dukun Bayi (org) | |
|-----|----------------|-----------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|
| | | | % | | % | | % |
| 1. | Sabu Barat | 51 | 27,42 | 255 | 30,76 | 37 | 23,72 |
| 2. | Hawu Mehara | 33 | 17,74 | 105 | 12,67 | 20 | 12,82 |
| 3. | Sabu Timur | 24 | 12,90 | 115 | 13,87 | 21 | 13,46 |
| 4. | Sabu Tengah | 23 | 12,37 | 104 | 12,54 | 39 | 25 |
| 5. | Sabu Liae | 30 | 16,13 | 150 | 18,09 | 14 | 8,97 |
| 6. | Raijua | 25 | 13,44 | 100 | 12,07 | 25 | 16,03 |
| | Jumlah: | 186 | 100 | 329 | 100 | 156 | 100 |

Sumber: Sabu Raijua Dalam Angka, 2010.

Tabel ini menunjukkan bahwa di semua kecamatan terdapat posyandu, kader aktif dan dukun bayi. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan terhadap ibu hamil, menyusui dan bayi-balita cukup menyebar di kecamatan. Sebagian besar Posyandu berada di Kecamatan Sabu Barat, Hawu Mehara dan Liae. Kader Posyandu aktif juga sebagian besar berada di Kecamatan Sabu Barat dan Liae. Persebaran dukun bayi juga ada di

semua kecamatan dengan dominasi terbanyak di Sabu Tengah, Sabu Barat dan Raijua.

➤ **Keluarga Berencana.**

Tabel 2.26. Jumlah Peserta Keluarga Berencana di Sabu Raijua Tahun 2009

| No. | Kecamatan | Jenis Program KB | | | | |
|-----|----------------|------------------|----------|------------|-----------|----------|
| | | Suntik | IUD | Pil | Kordom | Implant |
| 1. | Sabu Barat | 219 | 5 | 113 | 7 | 2 |
| 2. | Hawu Mehara | 367 | -- | 62 | -- | -- |
| 3. | Sabu Timur *) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4. | Sabu Tengah | na | na | na | na | na |
| 5. | Sabu Liae | na | na | na | na | na |
| 6. | Raijua | 592 | -- | 84 | 7 | -- |
| | Jumlah: | 1.178 | 5 | 259 | 14 | 2 |

Sumber: Sabu Raijua Dalam Angka, 2010.

*) . Kec. Sabu Timur: total semua jenis program KB: 240.

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua peserta program KB di Sabu Raijua berjumlah 1.698 orang (termasuk Kecamatan Sabu Timur). Sebagian besar dari antara mereka memilih ber-KB dengan suntikan dan minum pil KB. Terdapat juga dua orang dari Sabu Barat yang memilih metode implant.

b. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. Berdasarkan gambaran PDRB dan besaran kontribusi tiap sektor terhadap laju pertumbuhan PDRB dapat diketahui bahwa sektor jasa memberikan kontribusi terbesar pada tiap tahunnya, sedangkan sektor yang memiliki potensi pengembangan adalah sektor pertanian, pertambangan dan industri pengoiahan. Besaran kontribusi tiap sektor tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.27. Kontribusi Sektor yang Memiliki Potensi Pengembangan Bagi PDRB Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2008-2010

| Lapangan Usaha | Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp) | | | Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Juta Rp.) | | |
|---------------------|---------------------------------------|------------|------------|--|-----------|-----------|
| | 2008 | 2009* | 2010** | 2008 | 2009* | 2010** |
| Pertanian : | 150.682,68 | 157.797,03 | 159.091,80 | 79.894,86 | 81.011,59 | 81.236,29 |
| Pertambangan | 974,67 | 1.050,56 | 1.084,38 | 712,74 | 752,93 | 761,67 |
| Industri Pengolahan | 3.881,16 | 4.258,40 | 4.777,96 | 3.206,05 | 3.467,43 | 3.496,99 |

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua dalam Angka, 2011

- * : angka sementara
- ** : angka sangat sementara

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari ketiga sektor potensi tersebut, sektor pertanianlah memiliki nilai terbesar. Kontribusi terbesar dari sektor ini berasal dari sub sektor perikanan yang memiliki potensi sangat besar baik dari perikanannya, rumput laut dan hasil laut lainnya termasuk pengembangan wisata bahari. Kondisi laut Sabu memiliki potensi kekayaan alam dan potensi panoramanya yang sangat indah dan menarik serta berpotensi bagi pengembangan investasi di daerah. Laut Sabu dengan potensi laut yang melimpah merupakan kawasan laut di sekitar Kabupaten Sabu Raijua yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi wilayah. Selain potensi laut, perlu juga dikembangkan sektor-sektor lainnya yang mendukung pengembangan potensi laut dan kepariwisataan seperti sektor industri pengolahan, perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan, komunikasi dan lembaga keuangan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat juga dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan sebesar 5,54 %, melaju lebih cepat dibanding dua tahun lainnya yakni 4,96 % di tahun 2007 dan 4,35% di tahun 2008. Sebesar 1,63 % berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran; 1,61 % dari sektor pertanian dan 1,21 % dari sektor

jasa-jasa. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2009, kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restaurant menggeser sektor pertanian yang sebelumnya selalu memberikan kontribusi terbesar bagi laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sabu Raijua.

Tabel 2.28. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2008-2010

| Indikator | Kondisi | | | | Perkiraan | |
|---------------------|---------|-------|------|--------|-----------|-------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 * | 2011 | 2012 |
| Pertumbuhan ekonomi | 4,96 % | 4,35% | 5,4% | 5,75% | 5,90% | 6,20% |

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua dalam Angka Tahun 2011

* angka sementara

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Berikut ini disajikan beberapa indikator kinerja pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai berikut:

➤ Kondisi infrastruktur di Kabupaten Sabu Raijua

Keberadaan dan kualitas sarana/prasarana berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan desa - kota kecamatan – kota kabupaten merupakan prasyarat yang cukup penting dalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kebutuhan sarana/prasarana ini diperberat pula dengan kondisi riel kabupaten ini sebagai kabupaten kepulauan.

Untuk perhubungan laut, pulau Sabu mempunyai dua buah pelabuhan (di Sabu Barat dan Sabu Timur), dan sebuah di pulau Raijua. Sementara itu Sabu mempunyai sebuah lapangan udara perintis yang didarati oleh dua buah pesawat perintis setiap hari. Pulau Sabu dan Raijua belum mempunyai pelabuhan BBM dan SPBU. Akibatnya ialah BBM diangkut dari Kupang dengan mempergunakan kapal layar motor yang harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan tantangan angin dan gelombang tinggi pada musim angin barat dan angin timur. Konsekuensi selanjutnya ialah mahalnnya harga bahan bakar, termasuk BBM untuk kebutuhan rumah tangga dan tingginya biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, tenaga listrik dan biaya produksi. Biaya produksi penangkapan ikan dan pembudidayaan rumput laut misalnya harus menanggung biaya bensin yang cukup tinggi untuk perahu motor yang mereka gunakan.

Supply tenaga listrik di Kabupaten Sabu Raijua yang dilayani PLN baru mencakup Pulau Sabu sementara Pulau Raijua belum terjangkau layanan PLN. Data tahun 2009 menunjukkan bahwa pelayanan listrik PLN yang hanya menyala pada

malam hari baru menjangkau 1.628 rumahtangga pelanggan, sementara itu 434 rumahtangga menggunakan tenaga listrik non PLN (Kec. Sabu Raijua, 2010). Kondisi terakhir layanan listrik PLN mulai menyala siang-malam setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Januari 2011.

Infrastruktur perhubungan darat, panjang jalan di Sabu Raijua tercatat 1.083 km yang terdiri dari: (1). Jalan provinsi 48,20 km (4,45%), (2). jalan kabupaten 121,80 km (11,24%) dan (3). sisanya merupakan jalan desa dan jalan non status sepanjang 913,80 km (84,31%). Dari segi kondisi permukaan, tercatat: 170 km beraspal (15,69%) dan sisanya berupa jalan tanah dan kerikil baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten dan desa. Sebagian besar dari panjang jalan iri adalah jalan kerikil dan jalan tanah, Tidak kurang dari lima unit jembatan permanent dibangun pemerintah Kabupaten Kupang dan Probinsi NTT di pulau Sabu.Sementara itu sebagian besar dari permukaan jalan yang beraspal berada dalam kondisi rusak dan belum diperbaiki.

Jalan dan jembatan ini setiap hari dilalui oleh 74 unit kendaraan roda enam, 75 unit kendaraan roda empat dan 3.579 unit kendaraan bermotor roda dua. Konstruksi jalan yang belum beraspal dan dilalui oleh banyak kendaraan akan mengakibatkan deteriorasi jalan dan jembatan, terutama pada musim hujan, yang membutuhkan biaya pembangunan dan pemeliharaan yang cukup tinggi.

➤ Kedudukan Kabupaten Sabu Raijua dalam RTRW Propinsi NTT

Kabupaten Sabu Raijua merupakan salah satu Kabupaten baru di Propinsi NTT yang terletak di kawasan selatan dan sebagai salah satu kabupaten terluar di NTT. Berdasarkan RTRW Propinsi, secara hirarki struktur ruang, Kota Seba di Kabupaten Sabu Raijua dikembangkan sebagai pusat kegiatan lokal dengan Kecamatan Hawu Mehara sebagai kecamatan strategis di Propinsi NTT. Untuk memperkuat posisi Sabu Raijua dalam konstelasi struktur tata ruang propinsi, maka di Kabupaten Sabu Raijua dikembangkan rencana jaringan jalan strategis nasional yang meliputi ruas jalan yang menghubungkan Mesara-Seba-Bolow. Jaringan jalan kolektor primer dengan status jalan nasional adalah ruas jalan Sabu Timur - Sabu Barat - Hawu Mehara. Rencana pengembangan transportasi penyeberangan akan dikembangkan pe'abuhan penyeberangan lintas kabupaten berupa Pelabuhan Seba yang juga merupakan pelabuhan pengumpan. Ditinjau dari aspek transportasi udara, Bandar Udara Terdamu merupakan bandara udara pengumpan.

Jaringan energi listrik yang dikembangkan di Pulau Sabu adalah jaringan transmisi energi listrik yang menghubungkan Sabu Timur-Sabu Barat-Hawu Mehara. Kondisi saat ini di Kabupaten Sabu Raijua sudah terlayani oleh layanan listrik 24 jam.

Sedangkan jaringan telekomunikasi yang dikembangkan di Sabu Raijua adalah jaringan teresterial dan jaringan satelit.

Pengembangan sistem jaringan sumber daya air diarahkan pada pemanfaatan potensi sumber daya air di Daerah Aliran Sungai (DAS) di mana DAS Sabu merupakan bagian dari pengembangan Satuan Wilayah Sungai (SWS) Timor-Rote Ndao-Alor.

➤ Luas wilayah produktif

Ditinjau dari ketersediaan lahan, luasan lahan kosong yang belum tergarap masih luas di Kabupaten Sabu Raijua. Lahan kosong ini tidak semuanya produktif bagi pengembangan kegiatan pertanian mengingat kondisi alam yang tidak mendukung untuk pengembangan pertanian dan hanya bisa dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, pertanian lahan kering dan peternakan. Luasan lahan yang dapat dimanfaatkan tersebut diperkirakan 39.425,19 ha, atau lebih dari separuh luasan lahan Kabupaten Sabu Raijua yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan produktif. (Lihat Tabel berikut).

Tabel 2.29. Luasan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Lahan Produktif

| No. | Penggunaan Lahan | Luasan (Ha) |
|-----|----------------------------|-------------|
| | Kebun/perkebunan | 5 663,93 |
| | Padang rumput/tanah kosong | 14.207,35 |
| | Semak/belukar | 9.555,96 |
| | Tegalan/ladang | 9.997,95 |
| | Total | 39.425,19 |

Sumber : RTRW Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2011



RPJMD KABUPATEN SABU RAIJUA

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah Kabupaten Sabu Raijua dikelola sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kapasitas fiskal yang dimiliki, tingkat ketergantungan fiskal, realisasi belanja yang menggambarkan tentang keterkaitan aspek perencanaan penganggaran serta bagaimana pengelolaan kas telah dilakukan untuk menjamin likuiditas dan pemanfaatan unsur pembiayaan secara efisien dan efektif.

Namun sebagai sebuah daerah otonom baru, Kabupaten Sabu Raijua belum mempunyai dokumen spesifik tentang pendapatan daerah, kebijakan keuangan daerah, belanja dan pembiayaan daerah di masa lampau. Demikian pula halnya dengan dokumen capaian kinerja untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Oleh karena itu maka arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam tahun pertama ini merupakan tahapan awal dari kebijakan keuangan daerah. Tentu sebagai langkah awal akan terdapat banyak data mengenai penerimaan daerah maupun belanja dan pengeluaran daerah lainnya belum tertera secara baik.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat yang dijalankan oleh semua perangkat daerah. Oleh karena itu dalam tahap awal, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tampak sangat rendah bila dibandingkan dengan sumber penerimaan daerah dari dana perimbangan yang dialokasikan pemerintah pusat. Kondisi ini tentu akan menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk bekerja keras meningkatkan kemampuan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pendapatannya sendiri dan kontribusi mereka dalam meningkatkan PAD.

Arah kebijakan peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui:

- 1). Intensifikasi pemungutan sumber-sumber PAD melalui upaya dalam pemungutan yang lebih intensif dari pos-pos penerimaan eksisting, sambil memperhatikan pungutan berlebihan yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan;
- 2). Ekstensifikasi dapat dilakukan melalui penerbitan Peraturan Daerah tentang sumber-sumber penerimaan daerah baru misalnya: retribusi parkir, pajak reklame, dll;
- 3). Membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan penerimaan daerah;
- 4). Membantu kemampuan permodalan dan kemampuan teknis usaha dan pemasaran dari perusahaan kecil dan menengah lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan kemampuan mereka untuk meningkatkan PAD.

Sebagai gambaran untuk memperkirakan tinggi-rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sabu Raijua dapat dilihat dalam data Retribusi Daerah asal Sabu-Raijua sebagai berikut:

Tabel 3.1. Retribusi Daerah Calon Kabupaten Sabu-Raijua Tahun 2006-2008

| No | Kecamatan | Tahun 2006 | | Tahun 2007 | | Tahun 2008 | |
|----|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Penetapan (Rp) | Realisasi (Rp) | Penetapan (Rp) | Realisasi (Rp) | Penetapan (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1. | Sabu Bri | 34.350.091 | 34.350.091 | 34.362.040 | 34.362.040 | 37.293.290 | 37.293.290 |
| 2. | Hw. Mhr | 15.879.463 | 15.879.463 | 15.890.719 | 15.890.719 | 22.469.839 | 22.469.839 |
| 3. | Sabu Tmr | 14.074.922 | 14.074.922 | 14.074.922 | 14.074.922 | 19.715.972 | 19.715.972 |
| 4. | Sabu Tng. | 11.458.692 | 11.458.692 | 16.716.732 | 16.716.732 | 11.458.692 | 11.458.692 |
| 5. | Sb. LiaE | 16.740.182 | 16.740.182 | 11.458.692 | 11.458.692 | 16.716.732 | 16.716.732 |
| 6. | Raijua | 9.873.401 | 9.873.401 | 9.837.401 | 9.837.401 | 9.837.461 | 9.837.461 |
| | Jumlah: | 102.340.751 | 102.340.751 | 102.340.606 | 102.340.606 | 117.491.926 | 117.491.926 |

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kupang, 2009.

Hal positif yang ditunjukkan oleh tabel ini ialah bahwa antara tahun 2006-2008 semua target retribusi daerah di Sabu-Raijua lunas terbayar pada waktunya. Dengan demikian masyarakat Sabu-Raijua tidak menunggak pembayaran retribusi, atau melunasi kewajibannya membayar pajak. Akan tetapi, mencermati angka-angka di atas, jumlah Pendapatan Asli Daerah Sendiri dari kabupaten baru ini sangatlah rendah. Nilai intrinsik yang rendah dengan prosentase pertumbuhan retribusi sekitar 14,80% per tahun antara tahun 2006-2008 menunjukkan bahwa dana ini saja tidak dapat diharapkan untuk menumbuhkan daerah ini atau membuat penduduknya lebih sejahtera dari keadaan mereka sekarang.

Sebagai kabupaten baru, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini memang masih terlalu rendah. Sementara itu menurut media massa, Kabupaten Kupang saja sebagai kabupaten induk PAD-nya diperkirakan hanya mencapai 2% dari APBD Kabupaten Kupang (Suara Pembaruan, 29/11/2009, hal. 16). Dengan menjadi daerah otonom, bertagai program pembangunan di daerah ini akan membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya mempengaruhi peningkatan PAD. Untuk data Pendapatan Daerah Sendiri yang dicatat oleh Panitia Pembentukan Calon Kabupaten Sabu-Raijua menunjukkan angka-angka sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Perbandingan Pendapatan Daerah Sendiri (PDS)
Kabupaten Sabu-Raijua dan Kabupaten Kupang**

| No. | Kabupaten | 2003 (Rp. 000) | 2004 (Rp. 000) | 2005 (Rp. 000) | % Kenaikan |
|-----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Kupang | 20.146.675,8 | 24.659.109,5 | 21.798.372,3 | 5,20 |
| 2. | Sabu Raijua | 528.751,4 | 444.066,6 | 931.380,9 | 38,07 |

Sumber: Bahan Kajian Calon Kab. Sabu-Raijua, hal. 46

Data di atas menunjukkan bahwa antara tahun 2003 dan 2005 terdapat kenaikan PDS di Sabu-Raijua yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan apa yang terjadi di Kabupaten Kupang (tanpa Sabu-Raijua). Dengan mendekatnya pelayanan pemerintahan, politik, dan pembangunan sosial-ekonomi daerah ini berpotensi untuk bertumbuh lebih cepat.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Sementara itu Kabupaten Sabu Raijua adalah kabupaten yang baru dan telah memiliki dua tahun realisasi keuangan daerah yaitu tahun 2009 dan 2010, sedangkan untuk tahun 2011 telah menjadi angka defenitif sebagaimana ditetapkan dalam Perda.

Pendapatan daerah yang dinyatakan dalam total penerimaan daerah terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain Penerimaan yang Sah. Pengelolaan pendapatan daerah dari ketiga sumber ini menggambarkan tentang kapasitas fiskal dan derajat otonomi fiskal Kabupaten Sabu Raijua, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2009 - 2011

| No. | Uraian | Realisasi Tahun 2009 (Rp) | Realisasi Tahun 2010 (Rp) | Defenitif Tahun 2011 (Rp) |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | PENDAPATAN | 10,156,796,053 | 120,221,595,813 | 270,092,259,000 |
| 1.1. | Pendapatan Asli Daerah | 156,796,053 | 1,481,584,953 | 1,177,740,000 |
| 1.1.1. | Pajak daerah | 4,109,000 | 221,997,214 | 381,955,000 |
| 1.1.2. | Retribusi daerah | 11,204,000 | 145,368,925 | 544,785,000 |
| 1.1.3. | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan | | | |
| 1.1.4. | Lain-lain PAD yang sah | 141,483,053 | 1,114,218,814 | 251,000,000 |
| 1.2. | Dana Perimbangan | | 105,155,843,564 | 259,908,863,000 |
| 1.2.1. | Dana bagi hasil pajak Dan bagi hasil bukan pajak | | 10,808,969,564 | 9,795,716,000 |
| 1.2.2. | Dana alokasi umum | | 64,261,074,000 | 195,911,747,000 |
| 1.2.3. | Dana alokasi khusus | | 30,085,800,000 | 54,201,400,000 |
| 1.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 10,000,000,000 | 13,584,167,296 | 9,005,656,000 |
| 1.3.1 | Hibah | 5,000,000,000 | 3,000,000,000 | |
| 1.3.2 | Dana darurat | | | |
| 1.3.3 | Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | | 2,083,429,296 | 1,414,535,000 |

| No. | Uraian | Realisasi Tahun 2009 (Rp) | Realisasi Tahun 2010 (Rp) | Defenitif Tahun 2011 (Rp) |
|-------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.3.4 | Dana penyesuaian dan otonomi khusus | | 4.186.938.000 | 7.591.121.000 |
| 1.3.5 | Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | 5.000.000.000 | 4.313.800.000 | |

Melihat struktur APBD di atas dapat dikatakan bahwa Sabu Raijua sebagai daerah otonom memiliki PAD yang masih sangat kecil dan awal pembentukannya ditopang oleh lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa hibah dan bantuan keuangan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun dalam perkembangannya PAD Kabupaten Sabu Raijua mulai memperlihatkan pertumbuhannya, disertai juga dengan peningkatan dana perimbangan dari tahun 2010-2011 terutama pada dana alokasi umum. Walaupun demikian daerah masih memiliki ketergantungan fiskal baik dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Pusat. Dengan demikian Kabupaten Sabu Raijua berupaya menerapkan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah untuk terus meningkatkan kapasitas keuangan daerah dengan menggali potensi daerah serta menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, pungutan hendaknya tidak memberatkan masyarakat, tidak merusak lingkungan hidup serta pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien.

Untuk gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa mendatang. Dengan demikian dalam rangka meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, perlu diperlihatkan proporsi realisasi belanja daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4. Proporsi Realisasi Belanja Kabupaten Sabu Raijua

| No | Uraian | Realisasi Tahun 2009 (Rp) | Realisasi Tahun 2010 (Rp) | Defenitif Tahun 2011 (Rp) |
|----|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Belanja | 4.650.477.750 | 99.260.077.713 | 281.467.502.341 |
| A | Belanja Tidak Langsung | 161.250.000 | 61.253.230.735 | 109.579.208.937 |
| 1 | Belanja Pegawai | | 48.189.630.445 | 92.343.511.592 |
| 2 | Belanja Bunga | | | |
| 3 | Belanja Subsidi | | | |
| 4 | Belanja Hibah | 60.000.000 | 4.399.325.700 | 3.201.197.345 |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 101.250.000 | 1.644.499.592 | 1.650.000.000 |
| 6 | Belanja Bagi Hasil | | | |
| 7 | Belanja Bantuan Keuangan | | 7.019.775.000 | 9.976.000.000 |
| 8 | Belanja Tidak Terduga | | | 2.408.500.000 |
| B | Belanja Langsung | 4.489.227.750 | 38.006.846.978 | 171.888.293.404 |
| 1 | Belanja Pegawai | 132.200.000 | 1.657.230.000 | 4.597.911.000 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.311.558.250 | 13.428.254.503 | 52.865.955.800 |
| 3 | Belanja Modal | 2.045.469.500 | 22.921.362.475 | 114.424.426.601 |

Sedangkan untuk realisasi pengeluaran pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Proporsi Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua

| No | Uraian | Realisasi Tahun 2009 (Rp) | Realisasi Tahun 2010 (Rp) | Defenitif Tahun 2011 (Rp) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Pembiayaan Daerah | 119.722.500 | 5.317.781.803 | 11.375.243.341 |
| A | Penerimaan Pembiayaan | 125.197.500 | 5.767.781.803 | 14.375.243.341 |
| 1 | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) | | 5.626.040.803 | 13.125.243.341 |
| 2 | Pencairan dana cadangan | | | |
| 3 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | |
| 4 | Penerimaan pinjaman daerah | | | |
| 5 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | 125.197.500 | | |
| 6 | Penerimaan piutang Jaerah | | | 1.250.000.000 |
| 7 | Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah | | 141.741.000 | |
| B | Pengeluaran Pembiayaan | 5.475.000 | 450.000.000 | 3.000.000.000 |
| 1 | Pembentukan dana cadangan | | | |
| 2 | Penyertaan modal (investasi) daerah | | 450.000.000 | 1.000.000.000 |
| 3 | Pembayaran pokok utang | | | |
| 4 | Pemberian pinjaman Jaerah | 5.475.000 | | 2.000.000.000 |

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Untuk mewujudkan Visi, Misi serta program pembangunan daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2016, maka pemerintah daerah perlu mendayagunakan semua potensi daerah secara bertanggungjawab serta berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta daya dukung ruang.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dari sisi fiskal pemerintah daerah memiliki keterbatasan, untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk menjalin kerjasama dengan

swasta dan stakeholder lainnya baik dari dalam daerah, regional, nasional bahkan internasional. Untuk itu diperlukan aparatur daerah yang profesional dan fasilitatif sehingga memudahkan dalam penyediaan dukungan baik secara kelembagaan dan birokrasi yang berkualitas. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat menciptakan iklim investasi dan usaha yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan serta peningkatan ekonomi keluarga.

Selain itu alokasi belanja daerah haruslah terarah, terukur serta menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan perlu merubah pola kerja dan pola pikir bahwa alokasi anggaran bukan sekedar dihabiskan akan tetapi harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat serta menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kinerja aparatur tidak hanya dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan tetapi perlunya penyusunan dokumen pendukung berupa data yang akurat serta akuntabel dan disiapkan secara berkala sebagai upaya untuk memperbarui data indikator kinerja pembangunan daerah.

Indikasi dana yang dikemukakan adalah indikasi dana berdasarkan kemampuan fiskal daerah yang akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan demikian setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dituntut untuk berkreasi dan inovatif memanfaatkan alokasi dana secara maksimal serta transparan, akuntabel serta menghindari segala bentuk pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengelolaan belanja daerah perlu berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu belanja daerah hendaknya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Kabupaten Sabu Raijua.

Peraturan Pemerintah No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, memisahkan antara komponen belanja daerah kedalam bidang urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar, sementara itu urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Peraturan Pemerintah tersebut menjadi pedoman pengelolaan keuangan daerah, untuk memberi arah serta rambu-rambu pada belanja daerah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian maka:

- 1). Belanja daerah wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu: (a). Penguatan Ekonomi Rakyat; (b). Pengembangan Pendidikan; (c). Pemeliharaan Kesehatan; (d). Penegakkan hukum, HAM, pertahanan dan keamanan; (e). Pengembangan Budaya Politik dan Birokrasi Pemerintahan; (f). Pengembangan Aspek Sosial Kemasyarakatan; (g). Pengembangan Tataruang, Lingkungan Hidup dan Geografi;
- 2). Rendahnya potensi pendapatan daerah baik yang bersal dari PAD maupun dari dana dekonsentrasi menghendaki adanya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;

- 3). Kebijakan penggunaan anggaran hendaknya diarahkan secara terfokus pada strategi dan program-program pembangunan yang sudah direncanakan secara memadai;
- 4). Perlu kreatifitas dari semua unsur pemerintahan untuk menggali sumber-sumber baru PAD;
- 5). Pembiayaan dengan menggunakan dana SiLPA hendaknya diarahkan pada investasi pemerintah yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan PAD.

Selain itu untuk meringkatkan efektivitas belanja daerah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas belanja daerah melalui pemantapan pelaksanaan kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expendeture framework*) dan pemantapan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (*perfomance based budgeting*) antara lain melalui restrukturisasi program dan kegiatan agar sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai serta penyusunan indikator kinerja yang tepat dan terukur serta dapat dilaksanakan.
2. Meningkatkan kemampuan dan keterkaitan perencanaan dengan penganggaran serta keterkaitan prioritas pembangunan nasional dan daerah dan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga.
3. Menyusun alokasi belanja daerah yang lebih tepat sasaran dengan menempatkan prioritas pendanaan pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah/masyarakat serta perkembangan perekonomian daerah serta dapat menciptakan lapangan kerja serta mendukung peningkatan kualitas layanan.
4. Memperkuat pemantauan dan evaluasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dan penganggaran.
5. Menyempurnakan mekanisme administrasi, perencanaan, pencairan dan pelaksanaan agar lebih cepat dan akuntabel.

Potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan budaya lokal perlu sungguh-sungguh diketahui oleh semua pejabat eksekutif dan legislatif untuk dikembangkan dalam upaya penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesempatan berusaha dan peningkatan pendapatan. Program-program pembangunan yang dibelanjai dengan keuangan daerah hendaknya dilakukan dengan "*costless, develop more*". Hal ini tentu secara transparan hendaknya dapat dilihat dalam penyusunan program dan alokasi anggaran belanja tahunan daerah.

Untuk kepentingan tertentu pemerintah daerah sedapat mungkin menghindari pinjaman dari perbankan atau lembaga bukan bank lainnya untuk tidak menjadi beban anggaran daerah ke depan. Pemerintah daerah juga dapat membentuk dana cadangan untuk membiayai program pembangunan tertentu yang dananya tidak cukup tersedia dalam satu tahun anggaran.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai apa yang dikatakan sebagai *costless, develop more* dalam pendekatan pembangunan kerakyatan lima tahun ke depan

hendaknya Eksekutif dengan semua SKPD yang terkait dalamnya dan juga Legislatif memperhatikan beberapa peluang kebijakan umum anggaran sebagai berikut:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata dengan prioritas pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, kerajinan dan usaha kecil menengah untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah;
2. Memberikan pelatihan, bantuan dan proteksi kepada masyarakat miskin untuk membangun usaha kecil dalam mencukupi kebutuhan minimalnya dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menyumbang PAD;
3. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat: pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak lainnya terutama bagi golongan masyarakat miskin;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kesempatan berusaha di sektor informal, koperasi dan UKM;
5. Menyejukkan iklim investasi dan menjamin keamanan investasi agar dapat menarik investor untuk berinvestasi dalam berbagai sektor;
6. Optimalisasi pengelolaan asset dan kekayaan daerah secara professional agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah;
7. Kembangkan BUMD (Perusahaan Daerah) yang sehat dan *profitable* sehingga dapat menyumbang pada peningkatan pendapatan daerah;
8. Mengembangkan iklim yang kondusif untuk menumbuhkan kemitraan yang produktif antara pemerintah dengan swasta, masyarakat/koperasi dengan swasta, swasta dengan swasta, pemerintah dengan masyarakat/koperasi untuk menumbuhkan sistem ekonomi yang kuat;
9. Setiap pengeluaran daerah hendaknya mengacu pada standard harga dengan prinsip efisien dan efektif.

3.3.2. Indikasi Pendanaan Program Pembangunan Daerah

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2016, yang masih bergantung pada pendapatan dari pemerintah berupa dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah perlu ditopang oleh pendapatan asli daerah, berdasarkan penerapan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di samping itu dukungan dari Pemerintah Propinsi NTT serta dunia usaha dan masyarakat sangat diharapkan melalui berbagai kebijakan yang mendorong tumbuhkembangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan undang-undang undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah dalam upaya memperluas obyek pajak daerah dan obyek retribusi daerah

sesuai dengan perkembangan perekonomian daerah dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas.

A. Prediksi Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah terdiri dari tiga sumber penerimaan yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah

Dalam era otonomi setiap daerah dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan daerah secara mandiri dalam arti mengeliminir tingkat ketergantungannya dalam pembiayaan pembangunan daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk berkreasi serta tanggap dalam melihat dan memanfaatkan setiap peluang untuk mengembangkan potensi daerah secara bertanggungjawab dan berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang digali dan dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang terdiri dari 3 obyek penerimaan yaitu Pajak daerah, Retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan data dan potensi penerimaan serta mempertimbangkan perkembangan ekonomi daerah, maka pendapatan asli daerah Kabupaten Sabu Raijua diprediksi sebagai berikut :

Tabel 3.6. Perkiraan pendapatan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 – 2015

| No | Uraian | Data tahun dasar 2010 (Rp) | Proyeksi | | | | |
|-------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2011 (Rp) | 2012 (Rp) | 2013 (Rp) | 2014 (Rp) | 2015 (Rp) |
| 1 | PENDAPATAN | 120,221,595,813 | 270,092,259,000 | 297,101,484,900 | 326,811,633,390 | 359,492,796,729 | 395,442,076,402 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 1,481,584,953 | 1,177,740,000 | 1,295,514,000 | 1,425,065,400 | 1,567,571,940 | 1,724,329,134 |
| 1.1.1 | Pajak daerah | 221,997,214 | 221,995,000 | 422,167,000 | 462,165,550 | 502,382,105 | 559,220,315 |
| 1.1.2 | Retribusi daerah | 145,368,925 | 144,780,000 | 599,260,500 | 659,189,850 | 725,108,835 | 797,619,719 |
| 1.1.3 | Lain-lain PAD yang sah | 1,114,218,814 | 251,000,000 | 276,100,000 | 303,710,000 | 334,081,000 | 367,489,100 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 105,154,840,561 | 259,908,863,000 | 285,899,749,300 | 314,489,724,230 | 345,938,696,653 | 380,537,546,318 |
| 1.2.1 | Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak | 10,808,969,564 | 9,795,716,000 | 10,775,287,600 | 11,852,816,360 | 13,038,097,996 | 14,341,907,796 |
| 1.2.2 | Dana alokasi umum | 64,261,074,000 | 195,911,747,000 | 215,502,921,700 | 237,053,213,870 | 260,758,535,257 | 286,634,380,783 |
| 1.2.3 | Dana alokasi khusus | 30,085,800,000 | 54,201,400,000 | 59,621,540,000 | 65,583,694,000 | 72,142,063,400 | 79,356,269,740 |

| | | | | | | | |
|-------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 13,584,167,296 | 9,005,656,000 | 9,976,221,600 | 10,896,843,760 | 11,936,528,136 | 13,185,180,950 |
| 1.3.1 | Hibah | 3,000,000,000 | | | | | |
| 1.3.3 | Dana bagi hasil pajak dan provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | 2,083,429,296 | 1,414,535,000 | 1,505,988,500 | 1,711,287,350 | 1,882,746,085 | 2,071,020,694 |
| 1.3.4 | Dana penyesuaian dan otonomi khusus | 4,186,938,000 | 7,591,121,000 | 8,350,233,100 | 9,185,256,410 | 10,103,782,051 | 11,114,160,256 |
| 1.3.5 | Bantuan keuangan dari prov./Pemda lainnya | 4,313,800,000 | | | | | |

*) APBD Tahun Anggaran 2011

Melalui berbagai kebijakan, seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan bertumbuh rerata pada angka 10,0 persen per tahun selama periode Tahun 2011 – 2016.

Beberapa kebijakan dari masing-masing sumber penerimaan yang perlu diperhatikan dalam alokasi anggaran ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, adalah antara lain:

- a) Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan di mana retribusi pajak tersebut dipungut;
- b) Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas di mana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah;
- c) Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah;
- d) Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan di mana dana tersebut dialokasikan;
- e) Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai dengan jenis dana bagi hasil diperoleh.

B. Prediksi Belanja Daerah.

Belanja daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, yang terdiri dari:

- Belanja Tidak Langsung dengan obyek belanja: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Desa, dan belanja tidak terduga. Dari data keuangan yang ada menunjukkan bahwa belanja bunga dan belanja subsidi tidak dialokasikan dananya mengingat Kabupaten Sabu Raijua tidak memiliki hutang/pinjaman serta tidak ada belanja subsidi.
- Belanja Langsung terdiri dari obyek: belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Prediksi belanja daerah Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7. Perkiraan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 – 2015

| No | Uraian | Data tahun dasar 2010 (Rp) | Proyeksi | | | | |
|-------|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 2011 (Rp)* | 2012 (Rp) | 2013 (Rp) | 2014 (Rp) | 2015 (Rp) |
| | BELANJA | 99,260,077,713 | 281,467,502,341 | 309,614,252,575 | 340,575,677,833 | 374,633,245,616 | 412,096,570,177 |
| 2.1. | Belanja Tidak Langsung | 61,253,230,775 | 109,579,208,937 | 120,537,129,831 | 132,590,842,814 | 145,949,927,093 | 160,434,919,805 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 48,189,630,443 | 92,343,511,592 | 101,577,842,751 | 111,735,649,126 | 122,909,213,929 | 135,200,135,322 |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 4,399,325,700 | 3,201,197,345 | 3,521,317,080 | 3,873,448,787 | 4,260,793,666 | 4,686,873,033 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 1,544,499,592 | 1,650,000,000 | 1,815,000,000 | 1,996,500,000 | 2,196,150,000 | 2,415,765,000 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | 7,019,775,000 | 9,976,000,000 | 10,973,600,000 | 12,070,960,000 | 13,278,056,000 | 14,605,861,600 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | | 2,408,500,000 | 2,649,350,000 | 2,914,285,000 | 3,205,713,500 | 3,526,284,850 |
| 2.2. | Belanja Langsung | 38,006,846,978 | 171,888,293,404 | 189,077,122,744 | 207,984,835,019 | 228,783,318,521 | 251,661,650,373 |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 1,657,230,000 | 4,597,311,000 | 5,057,702,100 | 5,563,472,310 | 6,119,819,541 | 6,731,801,495 |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13,428,254,533 | 52,865,955,803 | 58,152,551,383 | 63,967,807,522 | 70,364,587,174 | 77,401,045,891 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 22,921,362,475 | 114,424,426,601 | 125,866,869,261 | 138,453,556,187 | 152,298,911,806 | 167,528,802,987 |

*) APBD Tahun Anggaran 2011

Data di atas menunjukkan bahwa belanja daerah diperkirakan akan bertumbuh per tahun sebesar 10,00 persen. Kondisi ini berdasarkan asumsi tidak ada kejadian luar biasa pada tingkat nasional maupun daerah yang dapat mempengaruhi kebijakan kerangka pemerintah.

Peningkatan pendapatan asli daerah perlu diintensifkan dengan mengoptimalkan penerimaan objek pajak baru dan optimalisasi sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah serta efisiensi alokasi belanja daerah terutama yang berkaitan dengan obyek belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta yang tidak langsung berkontribusi terhadap masyarakat.

Data yang diperoleh dengan mempergunakan asumsi dan prakiraan dari pendapatan dan belanja daerah tersebut di atas, dapat digunakan sebagai instrument untuk merumuskan kebijakan alokasi pendanaan berbagai program pembangunan daerah berdasarkan kemampuan fiskal daerah tersebut sebagai berikut :

1. Program peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, akuntabel dan transparan serta peningkatan kapasitas aparatur agar profesional dan fasilitatif terhadap kebutuhan perencanaan hingga evaluasi pembangunan daerah;
2. Program peningkatan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan melalui sektor pertanian dan sektor sekunder serta sektor tersier lainnya, serta meningkatkan ekonomi keluarga dengan memotivasi dan dorongan agar masyarakat Satu Raijua memiliki inisiatif dan berpartisipasi dalam pembangunan;
3. Program pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan masyarakat yang diutamakan bagi masyarakat miskin dan daerah perdesaan;
4. Program peningkatan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dengan meningkatkan angka melek huruf dan kualitas pendidikan masyarakat;
5. Program Peningkatan Kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat melalui pembangunan sektor-sektor yang memiliki daya ungkit terhadap indikator kesejahteraan masyarakat;
6. Program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur melalui peningkatan pelayanan akses transportasi darat, laut dan udara serta infrastruktur dasar pendukung usaha ekonomi produktif;
7. Program penataan ruang wilayah Pulau Sabu dan Pulau Raijua untuk menjadi pedoman pembangunan wilayah yang tepat sasaran dan tepat guna;
8. Program pengembangan potensi seni budaya lokal dan promosi pariwisata sebagai sektor penggerak ekonomi rakyat.

Penjabaran lebih lanjut program dan kegiatan tersebut di atas dielaborasi dalam urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD. Program-program tersebut dapat dilihat pada lampiran 1 yang merupakan program-program dari satuan kerja perangkat daerah periode Tahun 2011 – 2016 yang telah disesuaikan dengan nomenklatur program dan kegiatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Prediksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan fungsi pembiayaan adalah sebagai penyeimbang antara pendapatan dengan belanja. Terdapat dua Pos pembiayaan daerah yaitu :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah diupayakan diperoleh dari pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan pos penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan tersebut untuk menutup defisit anggaran dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Dengan demikian maka penghitungan penerimaan pembiayaan harus dilakukan secara cermat dan tepat tanpa mengabaikan aspek pelayanan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar penerimaan pembiayaan dapat menutup pengeluaran pembiayaan serta untuk menghindari terjadinya defisit anggaran.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pos-pos yang memungkinkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti Pemberian Pinjaman Daerah dan penyertaan modal daerah.

Dari berbagai kebijakan tersebut di atas, maka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua diupayakan sesuai dengan perkiraan pendapatan daerah dan potensi penerimaan pembiayaan. Hal ini perlu dilakukan agar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

BAR IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Sabu Raijua ini. Isu strategis bersifat strategis dan memiliki daya ungkit dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan. Namun isu strategis harus juga dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika dapat dipertanggung jawabkan.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Penyusunan RPJM Kabupaten Sabu Raijua 2011-2016 ini berawal dari kondisi daerah yang terdiri dari potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sabu Raijua yang kemudian dijadikan dasar dalam perumusan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Permasalahan yang diangkat merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Permasalahan yang ada di Kabupaten Sabu Raijua dapat dikristalisasi menjadi sebelas masalah pokok sebagai berikut :

1. Kabupaten Sabu Raijua merupakan daerah terluar dan terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara Australia yang dapat mengakibatkan kerawanan sosial politik dengan tingginya dinamika masyarakat yang melintasi perbatasan kedua negara sehingga dapat berpotensi mengganggu hubungan *diplomatic* kedua negara.
2. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua akibat dari rendahnya kinerja pembangunan ekonomi. Sampai saat ini Sabu Raijua masih mengandalkan sektor pertanian sebagai *leading sector* (sektor primer) yang dominan dalam pembentukan struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di mana kontribusi sektor Pertanian bagi PDRB tiap tahunnya semakin menurun. Demikian pula halnya dengan jumlah KK miskin (641 KK) atau 84 % tahun 2008, dan tahun 2009 meningkat menjadi 87 %, dengan pendapatan per kapita sebesar Rp. 355.297 per bulan, perumahan penduduk masih di bawah standar diukur dari perbandingan jumlah penghuni rumah dan luas lantai yang ideal.
3. Kondisi klimatologi dan geologi Kabupaten Sabu Raijua kurang mendukung pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan walaupun lahan kosong yang tersedia masih luas sehingga dalam pemanfaatan sumber daya lahan bagi kegiatan ekonomi produktif menjadi rendah akibat dari curah hujan yang minim.
4. Secara topografi mayoritas wilayahnya 5 - 15% bergelombang sehingga membutuhkan biaya yang lebih tinggi bagi konstruksi bangunan fisik serta rendahnya infrastruktur untuk komunikasi dua arah yang dapat menyebabkan minimnya informasi, pendukung akses sosial ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Sabu Raijua yang merupakan permasalahan mendasar juga karena tingginya angka kemiskinan yang menjadi penghambat utama dalam pembangunan Sumber Daya Manusia.

6. Rendahnya aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan akibat minimnya sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta tenaga guru dan tenaga medis, juga minimnya lembaga pendidikan non formal untuk menangani penduduk yang belum melek huruf.
7. Belum optimalnya pemanfaatan potensi laut yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ekonomi Wilayah Sabu Raijua
8. Degradasi lingkungan hidup di laut dan di darat sebagai akibat dari pencemaran lingkungan dan rendahnya upaya penghijauan dan reboisasi.
9. Industri rumah dengan bahan baku lokal seperti tenunan, garam, tanah liat, dan pisau/parang dll. juga tidak berkembang karena ketiadaan modal dan rendahnya profit driven masyarakat, rendahnya dorongan, motivasi dan pendampingan dari pemerintah dan dunia usaha.
10. Potensi alam seperti batu gamping untuk Semen dan Keramik, dan Mangan yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah dan dunia usaha.
11. Kinerja aparat birokrasi yang belum akuntabel dan transparan dan belum berorientasi pada kepentingan dan pelayanan publik.

4.2. Isu-isu Strategis

RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2016 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari RPJPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2008-2025. Oleh karena itu isu-isu strategis pada RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2016 berkaitan erat dengan isu-isu RPJPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2003-2025. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2016 memuat isu-isu strategis sebagai berikut:

1. **Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), peningkatan aksesibilitas masyarakat kepada sumber modal usaha dan optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan wilayah.**

Produk unggulan Kabupaten Sabu Raijua didominasi oleh komoditas pada sektor pertanian 45,2 % sebagai leading sektor dengan nilai tambah yang cukup besar. Untuk itu pengembangan mata rantai industri unggulan yang berbasis komoditas unggulan wilayah sangat penting selain meningkatkan nilai tambah domestik juga diharapkan menciptakan lapangan kerja. Kedekatan geografisnya dengan Jawa-Bali juga merupakan peluang terbangunnya koridor pengembangan ekonomi dan pariwisata.

Dilihat dari perspektif ekonomi, masing-masing desa di Kabupaten Sabu Raijua sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar mengingat sumber daya (sumberdaya alam dan sumberdaya manusia) dan kegiatan ekonomi daerah (industri tenunan, garam, tanah liat, dan pisau/parang dll) banyak berlokasi di desa. Bilamana potensi-potensi ekonomi tersebut dapat diberdayakan secara baik melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah maka desa akan dapat menciptakan pendapatan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan desa dan bukan lagi hanya sebagai sumber

terjadinya arus urbanisasi ke kota yang seringkali menciptakan masalah besar di kota, baik dari aspek permukiman, lapangan kerja, keamanan ataupun penambahan kemiskinan kota. Bila ekonomi desa maju maka pemerataan kegiatan ekonomi akan menjadi lebih baik dan tidak tersentralisasi di kota saja.

Apabila tercipta kemandirian ekonomi desa maka desa justru akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang produktif dan akan dapat menciptakan suplai dari usaha mikro, kecil dan menengah yang pada akhirnya dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Lembaga keuangan juga akan dapat tumbuh dan berkembang secara baik seiring tumbuhnya ekonomi desa. Koperasi ataupun lembaga keuangan lainnya akan menjadi pilar utama dalam mensupport model usaha kepada masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif di desa tersebut. Pasar desa akan berkembang menjadi pusat pertemuan antara permintaan dan penawaran yang dinamis dari output yang dihasilkan di desa tersebut dan akan mendorong aktif produktivitas masyarakat yang memperoleh nilai tambah dari kegiatan ekonomi.

2. Pembangunan Aksesibilitas Wilayah dan Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan di segala bidang terutama di bidang ekonomi dan pelayanan dasar (Energi, Transportasi dan Telekomunikasi) sangat membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Mengacu kepada keterbatasan fiskal daerah maka pengembangan infrastruktur diprioritaskan pada peningkatan dan pengembangan prasarana wilayah yang dapat menjangkau pusat-pusat produksi masyarakat dan sumberdaya alam. Peningkatan dan pengembangan prasarana wilayah ini diikuti dengan pengembangan sistem transportasi dan pengelolaan sumber-sumber mineral, serta pemanfaatan energi air dan matahari sebagai sumber energi listrik untuk memenuhi kebutuhan penduduk untuk dapat mengakses pusat-pusat produksi dan mendorong peningkatan mobilitas faktor-faktor produksi.

Dengan demikian pembangunan bermakna sebagai cara dan sarana bagi terjadinya transformasi nilai-nilai dalam kerangka pembentukan kepribadian sebagai bangsa Indonesia di mana pembangunan bukanlah tujuan yang bisa menghalalkan segala cara. Berdasarkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai itulah kita dapat memiliki sikap mental dan sikap hidup yang mampu mendorong proses percepatan pembangunan di semua bidang kehidupan, yang tercermin dari meningkatnya budaya dan peradaban, harkat, martabat dan derajat sebagai manusia, sehingga memiliki ketangguhan dan kepercayaan diri yang kuat atas dasar keunggulan-keunggulan yang dimiliki, dalam menjalani era globalisasi yang ditandai dengan persaingan yang semakin ketat.

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus menjadi landasan dan orientasi baru di dalam kebijakan pembangunan, mencakup: orientasi nilai-nilai pemerataan dan keadilan, *pro poor, pro job dan pro growth* (ekonomi); nilai-nilai demokrasi (politik); nilai-nilai

substantif institusional yang berbasis solidaritas guna melindungi mereka yang memiliki kapasitas terbatas terutama kaum perempuan dan anak (sosial); keseimbangan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan hak asasi manusia (hukum); nilai-nilai humanitarisme, demokrasi dan partisipasi (birokrasi); keseimbangan nilai-nilai keunggulan dan keadilan (pendidikan); nilai-nilai keserasian hubungan antara manusia dan lingkungan (lingkungan); nilai-nilai teisme dinyatakan melalui cinta kasih, toleransi dan saling menghormati di antara sesama (keagamaan); nilai-nilai kejujuran, budi pekerti, etos kerja (budaya); serta nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender (pengarus-utamaan gender) dan ekonomi desa yang didiami oleh mayoritas rakyat Sabu Raijua.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan merupakan juga sektor utama yang perlu diperhatikan karena merupakan sebagian dari urusan wajib yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Dilihat dari realita di lapangan rendahnya aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan akibat minimnya sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta tenaga guru dan tenaga medis, juga minimnya lembaga pendidikan non formal untuk menangani penduduk buta huruf dan penduduk yang berpendidikan kurang cukup.

4. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Peningkatan kesadaran bersama secara lintas sektor dan pengembangan kemampuan berbagai pihak untuk merestorasi dan memelihara lingkungan hidup yang sehat dalam kerangka keserasian hubungan antara manusia dan lingkungannya demi menjamin prinsip hidup berkelanjutan.

Kualitas lingkungan hidup yang telah mengalami penurunan dan yang berdampak negatif terhadap ketidak-seimbangan ekosistem pada gilirannya akan mengganggu masyarakat pedesaan yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya alam (SDA) penting untuk dilakukan konservasi dan rehabilitasi, serta peningkatan efektifitas pengawasan terhadap pemanfaatan SDA.

5. Kinerja Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Kinerja aparat birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik dirasa semakin penting bagi pengembangan daerah-daerah tertinggal. Tata kelola yang baik akan memastikan alokasi sumber daya secara adil tanpa mengabaikan efektivitas dan efisiensi. Pelayanan publik dan regulasi yang berkualitas juga berpotensi meningkatkan daya tarik daerah bagi berlangsungnya investasi.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Membangun *good governance* bukan semata dalam hal memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam *good governance*, tidak saja unsur pemerintah, tetapi juga sektor usaha/swasta dan masyarakat semestinya dapat berjalan secara efektif dan efisien melalui koordinasi yang sinergi dalam manajemen sektor publik, sektor swasta dan masyarakat. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan lapangan kerja dan pendapatan sementara masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Namun fakta menunjukkan bahwa masih banyak keterlambatan di bidang ini antara lain, rendahnya komitmen aparatur, rendahnya produktifitas aparatur, terbatasnya sarana dan prasarana aparatur, belum optimalnya penerapan regulasi, minimnya *reward* dan *punishment*, belum adanya analisis beban kerja, terbatasnya koordinasi lintas sektor dan tidak tersedianya *data base* yang akurat. Pembentukan atas sejumlah persoalan krusial tersebut membutuhkan komitmen yang serius oleh seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Perbaikan-perbaikan atas permasalahan tersebut di atas, bertujuan dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kinerja aparatur, perbaikan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintahan, serta menyusun peraturan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi adalah rumusan singkat dari suatu pandangan jauh ke depan dari cita-cita yang hendak dicapai. Setelah mencermati semua informasi awal yang telah dipaparkan di depan maka cita-cita yang hendak dicapai dalam pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sabu Raijua 5 (lima) tahun ke depan adalah:

"MENJADIKAN SABU RAIJUA, KABUPATEN YANG INOVATIF, MAJU DAN BERMARTABAT"

Kabupaten yang inovatif, ialah:

Kabupaten Sabu-Raijua yang para pejabat dan semua penduduknya mampu melihat dan menangkap peluang untuk memanfaatkan dan mengoperasikan semua sumberdaya manusia, budaya, alam dan semua peluang teknologi perangkat keras dan lunak yang ada di Sabu Raijua dan dari luar Sabu Raijua, demi kesejahteraan penduduk Sabu Raijua. Maju dan bermartabat adalah:

Manifestasi dari cita-cita untuk menciptakan peluang kerja multi sektoral yang dapat meningkatkan pendapatan, pemeliharaan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi dan merata bagi masyarakatnya. Secara psikologi-sosial hal ini bermakna menumbuhkan semua lapisan masyarakat Sabu-Raijua sebagai insan yang percaya pada Kekuasaan dan Kasih Tuhan, untuk menjadi lebih percaya diri dan maju. Penduduk Sabu-Raijua tidak perlu selalu mendapat julukan sebagai: "masyarakat miskin dari pulau terisolir". Mereka sekarang bangkit, percaya diri, berjuang menggapai kemajuan, meningkatkan kesejahteraan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di Nusa Tenggara Timur.

5.2. Misi

Misi adalah merupakan berbagai langkah dan kegiatan utama yang perlu dilakukan untuk mencapai atau mengaktualisasikan apa yang telah digariskan dalam Visi. Sesuai dengan pemahaman ini maka Misi yang hendak diemban di Kabupaten Sabu Raijua dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

- 5.2.1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Koordinatif, Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Cepat, Tepat Layan, dan Transparan, Peningkatan Jaminan Kehidupan Masyarakat yang Berkeadilan, Aman dan Bermartabat
- 5.2.2. Penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan peningkatan inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.
- 5.2.3. Pemeliharaan dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
- 5.2.4. Meningkatkan dan meratakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.
- 5.2.5. Peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Sabu Raijua.
- 5.2.6. Membangun dan memelihara infrastruktur untuk menunjang pembangunan.
- 5.2.7. Menata ruang Wilayah Pulau Sabu dan Raijua untuk menjadi pedoman pembangunan wilayah yang tepat sasaran dan tepat guna, dan membangun Tataruang kota yang modern dan asri.
- 5.2.8. Pengembangan seni budaya lokal dan promosi pariwisata.

Kedelapan misi tersebut di atas hendak dicapai melalui berbagai Program Pembangunan Rerbasis Masyarakat (*People Based Development Programs*)

Dengan Motto

"ORANG SABU RAIJUA JUGA BISA..."

Visi dan Misi tersebut di atas merupakan kekuatan moral yang memberikan motivasi, mendorong dan memberi arah kepada pencapaian cita-cita untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat Sabu Raijua. Motivasi, dorongan dan arah untuk mencapai tujuan bukan saja untuk kepentingan pemerintah dan semua jajaran SKPD yang terhisap di dalamnya tetapi bagi seluruh rakyat Sabu Raijua untuk memacu partisipasi mereka dalam melakukan kinerjanya mencapai tujuan.

5.3. Tujuan dan Sasaran.

- 5.3.1. Misi 1: Perencanaan Pembangunan Daerah yang Koordinatif, Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Cepat, Tepat Layan, dan Transparan, Peningkatan Jaminan Kehidupan Masyarakat yang Berkeadilan, Aman dan Bermartabat.

Tujuan:

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, akuntabel dan transparan.

Sasaran:

- (1). Perencanaan Pembangunan Daerah yang Koordinatif dan Partisipatif dalam mencapai tujuan misi dan visi RPJMD.
- (2). Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dalam pengelolaan kelembagaan dan administrasi pemerintahan yang professional, bersih dan berwibawa.
- (3). Peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat dan meningkatnya jaminan kehidupan masyarakat yang berkeadilan, aman dan bermartabat.

5.3.2. Misi 2 : Penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan peningkatan inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Tujuan:

- (1). Pengurangan angka pengangguran tenaga produktif.
- (2). Peningkatan pendapatan, inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran:

- (1). Peningkatan SDM pelaku usaha ekonomi disektor pertanian, perkebunan dan perikanan.
- (2). Termotivasinya masyarakat untuk aktif dalam menangkap peluang penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
- (3). Terwujudnya peningkatan produktifitas lahan garapan petani untuk kultivasi tanaman berumur pendek.
- (4). Tersedianya air pad. musim kemarau untuk pengembangan tanaman hortikultura.
- (5). Terwujudnya peningkatan produktifitas padi sawah degan sistem irigasi terpadu.
- (6). Terwujudnya Kabupaten Sabu Raijua sebagai penghasil bawah merah dan kacang hijau yang bernilai unggul dalam kuantitas dan kualitasnya.
- (7). Terwujudnya peningkatan produksi hasil laut dan perikanan.
- (8). Meningkatkan penciptaan lapangan kerja melalui Perusahaan Daerah dan menjalin kerjasama dengan investor.
- (9). Membentuk sistem regulasi perijinan usaha yang merangsang pertumbuhan usaha ekonomi rakyat.

5.3.3. Misi 3 : Pemeliharaan dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Tujuan:

- (1). Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan.

Sasaran:

- (1). Meningkatkan jangkauan pelayanan dan kualitas pelayanan kesehatan.
- (2). Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

5.3.4. **Misi 4 :** Meningkatkan dan meratakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

Tujuan:

- (1). Meningkatkan angka melek huruf dan mutu pendidikan masyarakat.

Sasaran:

- (1). Meningkatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak usia dini dan usia sekolah.
- (2). Meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga pendidik.
- (3). Meningkatkan presentase kelulusan siswa dari semua strata pendidikan.
- (4). Menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi dari golongan masyarakat kurang mampu.
- (5). Meningkatkan etos kerja para guru dan institusi pengelola pendidikan.

5.3.5. **Misi 5 :** Peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Sabu Raijua.

Tujuan:

- (1). Peningkatan pelayanan dasar berupa pelayanan kesehatan, air minum, pendidikan dan ekonomi kerakyatan.
- (2). Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat.
- (3). Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Sasaran:

- (1). Peningkatan taraf hidup secara kontinyu terutama kepada masyarakat miskin.
- (2). Terlatih, terdidik dan terbinanya SDM kreatif, inovatif dan kompetitif.
- (3). Pemanfaatan sumberdaya alam yang ramah lingkungan.
- (4). Memahami semua kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman dari program yang diimplementasikan untuk menjadi kekuatan pendukung program.

5.3.6. **Misi 6:** Membangun dan memelihara infrastruktur untuk menunjang pembangunan.

Tujuan:

- (1). Meningkatkan pelayanan akses transportasi darat, laut dan udara serta infrastruktur penunjang usaha ekonomi produktif.

Sasaran:

- (1). Meningkatkan kapasitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, saluran dan dam penangkap air hujan.
- (2). Meningkatkan fasilitas dan frekuensi perhubungan laut dan udara Sabu Raijua dengan kabupaten lainnya di NTT.
- (3). Meningkatkan jumlah air hujan yang tertampung dalam cek dam untuk pengembangan palawija.
- (4). Pemanfaatan kemungkinan eksploitasi air bawah tanah untuk supply air minum dan pengairan.
- (5). Supply listrik tenaga angin, matahari dan arus laut untuk melayani kota dan desa terpencil.

5.3.7. **Misi 7** : Menata ruang Wilayah Pulau Sabu dan Raijua untuk menjadi pedoman pembangunan wilayah yang tepat sasaran dan tepat guna, dan membangun Tataruang kota yang modern dan asri.

Tujuan:

- (1). Mewujudkan pembangunan ekonomi yang terarah sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah.

Sasaran:

- (1). Menata ruang wilayah Pulau Sabu dan Pulau Raijua untuk pembangunan wilayah yang tepat sasaran, tepat lingkungan dan tepat guna.
- (2). Menata ruang kota Thukota Kabupaten dan Kecamatan agar sesuai dengan kondisi wilayah kota dan pengembangannya di masa depan.
- (3). Menghijaukan wilayah Satu Raijua untuk memperbaiki lingkungan hidup.

5.3.8. **Misi 8** : Pengembangan seni budaya lokal dan promosi pariwisata.

Tujuan:

- (1). Memanfaatkan potensi seni budaya lokal dan potensi pariwisata sebagai sektor penggerak ekonomi rakyat.

Sasaran:

- (1). Melestarikan Nilai dan Seni Budaya lokal Sabu Raijua sebagai warisan leluhur.
- (2). Menjadikan Sabu Raijua sebagai daerah wisata budaya dan wisata bahari.
- (3). Memasarkan nilai-nilai dan seni budaya lokal sebagai komoditas wisata lewat Website dan program IT lainnya.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMEAGUNAN KABUPATEN SABU RAIJUA

Visi dan Misi Kabupaten Sabu Raijua adalah merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu sedikitnya lima tahun ke depan. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua adalah merupakan arah untuk mencapai tujuan bagi semua SKPD dan lintas SKPD dalam melakukan tugas dan fungsi masing-masing dalam pembangunan Sabu Raijua. Strategi dan arah kebijakan tersebut dalam lima tahun mendatang adalah:

Misi I : Perencanaan Pembangunan Daerah yang Koordinatif, Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Cepat, Tepat Layan, dan Transparan, Peningkatan Jaminan Kelhidupan Masyarakat yang Berkeadilan, Aman dan Bermartabat.

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|--|---|
| Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien, Akuntabel, dan Transparan | Perencanaan Pembangunan Daerah yang Koordinatif dan Partisipatif dalam mencapai tujuan visi dan misi RPJMD | <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program/Kegiatan agar sejalan dengan Tujuan dari Visi Misi Dokumen Perencanaan Daerah. Restrukturisasi Program, Kegiatan yang berlandaskan pada Struktur Organisasi, Anggaran, Struktur Kebijakan, dan Struktur Manajemen Kinerja | Pemantapan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Koordinatif dan Partisipatif. |
| | Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dalam pengelolaan kelembagaan dan administrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berwibawa. | <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Disiplin dan Etos Kerja Aparatur. Pengembangan Profesionalisme aparatur lewat pendidikan dan Pelatihan | Meningkatkan Kapasitas aparatur |

| | | |
|--|---|--|
| | Peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat dan meningkatnya jaminan kehidupan masyarakat yang berkeadilan, aman dan bermartabat. 1. Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP). 2. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pelayanan Publik. 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemerintahan (Kantor, Rumah Jabatan) | Penyusunan Regulasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) |
| | | |

Misi II : Penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan peningkatan inisiatif serta partisipatif masyarakat dalam kegiatan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|---|--|
| Pengurangan angka pengangguran tenaga kerja produktif | Peningkatan SDM pelaku usaha ekonomi disektor pertanian, perkebunan dan perikanan | Penyuluhan dan pelatihan pertanian terpadu dan sistem pengelolaan perikanan terpadu | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kreativitas dan Inovasi SDM dalam menciptakan lapangan Kerja |
| | Termotivasinya masyarakat untuk aktif dalam menangkap peluang penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan | Menciptakan peluang-peluang usaha baru bagi para wirausahar muda | |
| Peningkatan pendapatan, inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat | Terwujudnya peningkatan produktifitas lahan pertanian petani untuk kultivasi tanaman berumur pendek | Pengelolaan pertanian terpadu lahan kering dengan tanaman berumur pendek yang sesuai dengan iklim Kabupaten Sabu Raijua | <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian produktif untuk komoditas berumur pendek dan bernilai unggul • Optimalisasi tumpang gilir sawah dan penggarapan ladang untuk penanaman tanaman hortikultura. • Pembentukan Kebun Rakyat Mandiri |
| | Tersedianya air pada musim kemarau untuk pengembangan tanaman hortikultura. | Pemanfaatan air secara efisien dan optimal dengan sumber daya air yang tersedia | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah penampung air berupa waduk dan embung kecil • Mengeksploitasi sumber air bawah tanah sebagai air irigasi dengan memperhatikan aspek lingkungan |
| | Terwujudnya peningkatan produktifitas padi sawah dengan sistem irigasi terpadu | Pengelolaan lahan produktif untuk tanaman pangan dengan sistem tumpangsari yang memanfaatkan irigasi terpadu | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan hasil panen tanaman pangan dan tanaman hortikultura lainnya dari lahan produktif dengan sistem irigasi terpadu. |
| | Terwujudnya Kabupaten Sabu Raijua sebagai | Peningkatan produktifitas dan kualitas bawang | <ul style="list-style-type: none"> • Intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan lahan untuk |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | penghasil bawang merah dan kacang hijau yang bernilai unggul dalam kuantitas dan kualitasnya | merah dan kacang hijau sebagai komoditas unggul daerah sesuai dengan kemampuan dan daya dukung lahan | bawang merah dan kacang hijau sebagai komoditas unggulan daerah |
| | Terwujudnya peningkatan produksi hasil laut dan perikanan | Pengoptimalisasian pemanfaatan potensi hasil laut dan perikanan | • Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung produksi hasil laut dan perikanan, |
| | Meningkatkan penciptaan lapangan kerja melalui Perusahaan Daerah dan menjalin kerjasama dengan investor | Pembentukan perusahaan daerah dengan orientasi pengembangan potensi lokal | |
| | Membentuk sistem regulasi berijinar usaha yang merangsang pertumbuhan usaha ekonomi rakyat | Membentuk sistem perijinan satu atap | |
| | Meningkatkan peran kelembagaan non perbankan dan perbankan dalam memacu pertumbuhan usaha ekonomi rakyat | Menggatakan koperasi dan bank pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan pinjaman modal usaha kecil | |
| | | | Penciptaan iklim Investasi yang kondusif |

Misi III : Pemeliharaan dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|--|
| Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan daerah pedesaan | Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan | 1. Mengupayakan penempatan dokter dan perawat sebagai PNS. 2. Penyebaran jangkauan pelayanan Balni Pengobatan, paramedis dan obat-obatan untuk masyarakat di desa-desa terpencil. | 1. Peningkatan pelayanan RS, Puskesmas, Pustu. 2. Pengadaan laboratorium kesehatan dan tenaga pengelola lab. RS Kabupaten 3. Mengundang pengusaha apotik, untuk penyediaan obat-obatan di ibukota kabupaten dan kecamatan. |
| | Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi | Pemberdayaan perempuan dan anak untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat. | Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan anak Balita |

Misi IV : Meningkatkan dan meratakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|--|
| Meningkatkan angka melek huruf dan kualitas pendidikan masyarakat | Meningkatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak usia dini dan usia sekolah. | 1. Peningkatan peran dan fungsi komite sekolah dan Dewan Pendidikan Kabupaten. | 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan 2. Pengembangan Sekolah Mandiri |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>2. Pelaksanaan Akreditasi Sekolah secara berkelanjutan.</p> <p>3. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan</p> <p>4. Pemberantasan Buta Aksara di desa terpencil.</p> <p>5. Kerjasama dgn LPTK di NTT untuk pengadaan guru.</p> <p>6. Penilaian untuk penyempurnaan KTSP pada tiap jenjang pendidikan.</p> <p>7. Pengembangan forum guru Mapel UN, MDMP, KKG, KKKS, KKP's dll.</p> <p>8. Pemberian beasiswa kpd siswa berprestasi dari golongan kurang mampu.</p> | <p>3. Pembinaan sekolah berstandar internasional</p> <p>4. Menyusun grand design Pendidikan dan Perda Pendidikan</p> <p>5. Melakukan pengawasan melekat dan menindaklanjuti tiap laporan masyarakat.</p> |
| | Meningkatkan mutu tenaga pendidik | Penambahan jumlah tenaga pengajar | |
| | Meningkatkan mutu pendidikan | Penerapan Sistem manajemen Pendidikan yang compatible dengan karakteristik daerah yang berorientasi pada mutu dan Kualitas Pendidikan | |
| | Meningkatkan presentase kelulusan siswa dari semua strata pendidikan | | |

Misi V : Peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Sabu Raijua.

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Peningkatan pelayanan dasar berupa pelayanan kesehatan, air minum, pendidikan dan ekonomi kerakyatan | Peningkatan taraf hidup secara kontinyu terutama kepada masyarakat miskin | Memahami semua kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman dari program yang dilakukan dan kelola untuk menjadi kekuatan pendukung program. | Pemenuhan Kebutuhan dasar Masyarakat |
| | Terlatih, terdidik dan terbinanya SDM kreatif, inovatif dan kompetitif | | |
| | Pemanfaatan Sumber daya alam yang ramah lingkungan | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat | | | |
| Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup | | | |

Misi VI: Membangun dan memelihara infrastruktur untuk menunjang pembangunan.

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|---|--|
| Meningkatkan pelayanan dan transportasi darat, laut dan udara serta infrastruktur penunjang pada ekonomi produktif | Meningkatkan kapasitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, saluran dan dar penangkap air hujan. | Memfasilitasi kelancaran arus perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya. | Pembangunan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Ekonomi |
| | Meningkatkan fasilitas dan frekuensi per-hubungan laut dan udara Sabu Raijua dengan kabupaten lainnya di NTT | Melancarkan jalur transportasi penunjang pemasaran usaha ekonomi dan penumpang | |
| | Meningkatkan jumlah air hujan yang tertampung dalam cek dam untuk pengembangan palawija | Menambah jumlah embung dan dam kecil dalam menampung air pada musim penghujan | |
| | Pemanfaatan kemungkinan eksploitasi air bawah tanah untuk supply air minum dan pengairan | Eksplorasi dan eksploitasi sumber air tanah | |
| | Supply listrik tenaga angin, matahari dan arus laut untuk melayani kota dan desa terpencil. | Memfaatkan sumber energi alternative (angin, sinar matahari, arus laut) sebagai pembangkit tenaga listrik | |

Misi VII: Menata ruang Wilayah Pulau Sabu dan Raijua untuk menjadi pedoman pembangunan wilayah yang tepat sasaran dan tepat guna, dan membangun Tataruang kota yang modern dan asri

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|--------------------------------------|--|
| Mewujudkan pembangunan ekonomi yang terarah sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah | Menata ruang wilayah Pulau Sabu dan Pulau Raijua untuk pembangunan wilayah yang tepat sasaran, tepat lingkungan dan tepat guna. | Menetapkan RTRW, RDTRW, RTRK, RDTRK. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penertiban dan pengaturan pemanfaatan dan pengaturan lahan sesuai dokumen perencanaan tata ruang kota dan wilayah. 2. Memanfaatkan potensi SDA secara optimal dengan memperhatikan faktor kelestarian lingkungan hidup |
| | Menata ruang kota Ibukota Kabupaten dan Kecamatan agar sesuai dengan kondisi wilayah kota dan pengembangannya di masa | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | depan. | | |
| | Menghijaukan wilayah Sabu Raijua untuk memperbaiki lingkungan hidup. | | |

Misi VIII : Pengembangan seni budaya lokal dan promosi pariwisata.

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|--|---|
| Memanfaatkan potensi seni budaya lokal dan potensi pariwisata sebagai sektor penggerak ekonomi rakyat | Melestarikan Nilai dan Seni Budaya lokal Sabu Raijua sebagai warisan leluhur. Menjadikan Sabu Raijua sebagai daerah wisata budaya dan wisata bahari | 1. Memelihara dan menjaga keaslian dan kelestarian Nilai Budaya Lokal. 2. Eksplorasi Potensi wisata bahari. 3. Menasarkan seni dan budaya lokal, keindahan pantai dan biota laut sebagai komoditas wisata lewat Promosi Wisata (Web & IT lain) | Mengembangkan Seni, Budaya Lokal dan Promosi Wisata |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan | SKPD Penanggungjawab |
|--------|--|---|--|----------------|---------------------------------|
| | | Program/Kegiatan yang berlandaskan pada Struktur Organisasi, Anggaran, Struktur Kebijakan, dan Struktur Manajemen Kinerja | cepat tumbuh. <ul style="list-style-type: none"> Program perencanaan pembangunan daerah Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | |
| | Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dalam pengelolaan kelembagaan dan administrasi pemerintahan yang professional, bersih dan berwibawa. | 3. Peningkatan Disiplin dan Etos Kerja Aparatur. 4. Pengembangan Profesionalisme aparatur lewat pendidikan dan Pelatihan | <ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pendidikan Kedinasan | Wajib Wajib | Seluruh SKPD Sekretariat Daerah |
| | Peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat dan meningkatnya jaminan kehidupan masyarakat yang berkeadilan, aman dan bermartabat. | 1. Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP). 2. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pelayanan Publik. 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> Program Standarisasi Pelayanan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | Wajib Wajib | Seluruh SKPD Sekretariat Daerah |

Misi II : Penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan peningkatan inisiatif serta partisipatif masyarakat dalam kegiatan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---------------|---|
| Perusahaan dan kerjasama investor | Dacrah menjalin dengan | pengembangan potensi lokal | Investasi dan Realisasi Investasi | Pilihan Wajib | Modal |
| Membentuk sistem regulasi usaha merangsang pertumbuhan ekonomi rakyat | sistem perijinan usaha yang | Membentuk sistem perijinan satu atap | <ul style="list-style-type: none"> • Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir: tambak • Program pengembangan perikanan tangkap • Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor • Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kelautan dan Perikanan • Dinas Kelautan dan Perikanan • Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal • Dinas Koperasi dan UKM |
| Meningkatkan kelembagaan non perbankan dan memacu pertumbuhan ekonomi rakyat | peran non perbankan dalam usaha | Menggalakan koperasi dan bank pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan pinjaman modal usaha kecil | <ul style="list-style-type: none"> • Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif • Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Wajib | Dinas Koperasi dan UKM |

Misi III : Pemeliharaan dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|--|---|---------------|-----------------------|
| Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat bagi masyarakat miskin dan daerah pedesaan | Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan penempatan dokter dan perawat sebagai PNS. 2. Penyebaran jangkauan pelayanan Balai Pengobatan, paramedis dan obat-obatan untuk masyarakat di desa-desa terpencil. | <ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan pelayanan kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya • Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Wajib | Kesehatan |
| | Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi | Pemberdayaan perempuan dan anak untuk kesejahteraan keluarga dan | <ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak • Program promosi | Wajib | Kesehatan |

| | | | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | masyarakat. | kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat | | |
|--|-------------|--|--|--|

Misi IV : Meningkatkan dan meratakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan | SKPD Penanggungjawab |
|---|--|---|--|---------------|--|
| Meningkatkan angka melek huruf dan kualitas pendidikan masyarakat | Meningkatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak usia dini dan usia sekolah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran dan fungsi komite sekolah dan Dewan Pendidikan Kabupaten. 2. Pelaksanaan Akreditasi Sekolah secara berkelanjutan. 3. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan. 4. Pemberantasan Buta Aksara di desa terpencil. | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pendidikan Anak Usia Dini • Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun • Program Pendidikan Menengah • Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Kerjasama LPTK utk pengadaan guru • Penyempurnaan KTSP tiap jenjang pendidikan • Pengembangan forum guru Mapel, UN, MDMP, KKG, KKKS, KKPS, dll • Beasiswa bagi pelajar berprestasi dari golongan kurang mampu • Sekolah berstandar internasional • Grand Design Pendidikan dan Perda Pendidikan | Wajib | Pendidikan, kebudayaan, kepemudran dan Olah Raga |
| | Meningkatkan tenaga pendidik | Penambahan jumlah tenaga pengajar | | | |
| | Meningkatkan mutu pendidikan | Penerapan Sistem manajemen Pendidikan yang compatible dengan karakteristik daerah yang berorientasi pada mutu dan Kualitas Pendidikan | | | |
| | Meningkatkan presentase kelulusan siswa dari semua strata pendidikan | | | | |

Misi V : Peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Sabu Raijua.

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan | SKPD Penanggungjawab |
|--|---|---|---|---------------|----------------------|
| Peningkatan pelayanan dasar berupa pelayanan kesehatan, air minum, pendidikan dan ekonomi kerakyatan | Peningkatan taraf hidup secara kontinyu terutama kepada masyarakat miskin | Peningkatan fasilitas permukiman masyarakat kurang mampu | <ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan komunitas perumahan Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan | Wajib | Pekerjaan Umum |
| Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat | Terlatih, terdidik dan terbinanya SDM kreatif, inovatif dan kompetitif | Pemberdayaan masyarakat miskin dengan memberikan ketrampilan untuk berusaha | <ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Wajib | Dinas Sosial |
| Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup | Pemanfaatan Sumber Daya alam ramah lingkungan | Pengawasan pemanfaatan SDA yang berpotensi merusak kelestarian lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan | Wajib Pilihan | Dinas Sosial |

Misi VI: Membangun dan memelihara infrastruktur untuk menunjang pembangunan.

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|--|--|---------------|----------------------|
| Meningkatkan pelayanan akses transportasi darat, laut dan udara serta infrastruktur penunjang usaha ekonomi produktif | Meningkatkan kapasitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, saluran dan dam penangkap air hujan. | Memfasilitasi kelancaran arus perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya. | <ul style="list-style-type: none"> Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Wajib | Pekerjaan Umum |
| | Meningkatkan fasilitas dan frekuensi per-hubungan laut dan udara Sabu Raijua dengan kabupaten lainnya di NTT | Melancarkan jalur transportasi penunjang pemasaran usaha ekonomi dan penumpang | <ul style="list-style-type: none"> Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya | | |
| | Meningkatkan jumlah air hujan yang tertampung dalam cek dam untuk pengem- | Menambah jumlah embung dan dam kecil dalam menampung air | <ul style="list-style-type: none"> Program penyediaan dan pengolahan air baku | | |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan | SKPD Penanggungjawab |
|--------|--|--|--|---------------|----------------------|
| | bangan palawija | pada musim penghujan | <ul style="list-style-type: none"> Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | | |
| | | | | | |
| | Pemanfaatan kemungkinan eksploitasi air bawah tanah untuk supply air minum dan pengiriran | Eksporasi sumber air tanah | | Wajib | Dinas Perhubungan |
| | Supply listrik tenaga angru, matahari dan arus laut untuk melayani kota dan desa terpencil | Memfaatkan sumber energy alternative sebagai pengganti solar pembangkit tenaga listrik | | | |

Misi VII: Menata ruang Wilayah Pulau Sabu dan Raijua untuk menjadi pedoman pembangunan wilayah yang tepat sasaran dan tepat guna, dan membangun Tataruang kota yang modern dan asri

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan | SKPD Penanggungjawab |
|--|--|-------------------------------------|--|---------------|----------------------|
| • Lewujudkan pembangunan ekonomi yang terarah sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah | Menata ruang Wilayah Pulau Sabu dan Pulau Raijua untuk pembangunan wilayah yang tepat sasaran, tepat lingkungan dan tepat guna | Menetapkan RTRW, RDRW, RTRK, RDTRK. | <ul style="list-style-type: none"> Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengembangan data/informasi Program perencanaan pembangunan ekonomi | | Badan Perencana |
| | Menata ruang kota Ibukota Kaupaten dan Kecamatan agar sesuai dengan kondisi wilayah kota dan | | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | Wajib | |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan | SKPD Peranggungjawab |
|--------|--|----------|--|---------------|------------------------|
| | pengembangannya di | | Hidup. | | |
| | masa depan. | | • Program Rehabilitasi Hutan dan lahan | Wajib | Badan Lingkungan Hidup |
| | Menghijäukan wilayah Sabu Raijua untuk memperbaiki lingkungan hidup. | | | | |

Misi VIII : Pengembangan seni budaya lokal dan promosi pariwisata.

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan | SKPD Penanggungjawab |
|---|--|--|---|---------------|---------------------------------|
| Memanfaatkan potensi seni budaya local dan potensi pariwisata sebagai sector penggerak ekonomi rakyat | Melestarikan Nilai dan Seni Budaya lokal Sabu Raijua sebagai warisan leluhur. Menjadikan Sabu Raijua sebagai daerah wisata budaya dan wisata bahari | 1. Memelihara dan menjaga keaslian dan kelestarian Nilai Budaya lokal. 2. Eksplorasi Potensi wisata bahari. 3. Memasarkan seni dan budaya lokal, keindahan pantai dan biota laut sebagai komoditas wisata lewat Promosi Wisata | • Program Pengembangan Nilai dan Seni Budaya • Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Wajib | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2016 terimplementasikan melalui berbagai jenis program prioritas yang mencerminkan kebutuhan mendesak Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. Program tersebut terjabarkan dalam urusan wajib dan pilihan yang setidaknya dapat dipenuhi dalam periode lima tahun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Program-program tersebut telah disesuaikan dengan nomenklatur program menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat keterbatasan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial maka tidak semua program dapat dijadikan prioritas dalam RPJMD, sehingga bagi program prioritas SKPD Kabupaten dapat di-*breakdown* kedalam Rencana Strategis (Rencana Strategis) SKPD Kabupaten Sabu Raijua periode 2011-2016. Program prioritas SKPD untuk mendukung program prioritas yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2016, perlu dibuat dengan memperhitungkan sisa dari kapasitas riil yang telah digunakan dalam pembiayaan belanja langsung untuk program prioritas pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. Oleh karena itu perlu dilakukan pemilahan program dan kegiatan sebagai pendukung program prioritas dalam RPJMD.

Program-program prioritas tersebut akan diukur pada akhir periode perencanaan dengan membandingkan indikator kinerja pada akhir periode perencanaan dengan indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Program prioritas tersebut juga membutuhkan pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensinya. Secara garis besar, struktur anggaran belanja daerah terpilah menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Komponen belanja tidak langsung meliputi : (a) belanja pegawai, (b) belanja bunga, (c) belanja hibah, (d) belanja bantuan sosial, (e) belanja bagi hasil, (f) belanja bantuan keuangan, dan (g) belanja tidak terduga. Sementara komponen belanja langsung adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang melekat pada setiap kegiatan sebagai pelaksanaan atas program-program prioritas. Dalam konteks ini kebutuhan pendanaan lebih dititikberatkan pada pengalokasian anggaran belanja untuk program-program prioritas yang merupakan bagian dari belanja langsung. Dengan demikian, besarnya anggaran untuk masing-masing program prioritas diperoleh dari total anggaran belanja daerah setelah dikurangi belanja tidak langsung. Proyeksi alokasi anggaran untuk masing-masing program prioritas berdasarkan urutan urusan wajib dan pilihan dapat dilihat pada tabel 8.1 (*lampiran tabel 8.1*)

BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja Daerah adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dalam hal ini, Indikator Kinerja lebih menggambarkan tahun akhir dari pelaksanaan pemerintahan. Untuk mengevaluasi Kinerja Daerah dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan digunakan berbagai aspek dan tolok ukur. Aspek-aspek tersebut meliputi (1). Aspek Kesejahteraan Masyarakat dengan fokus kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga, (2). Aspek pelayanan umum.

Tabel 9.1
Indikator Kinerja Pembangunan
Menurut Sasaran Strategis

| No | Sasaran | Indikator Kinerja |
|-----|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | <p>MISI PERTAMA</p> <p>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</p> <p>1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Koordinatif dan Partisipatif dalam mencapai tujuan misi RPJMD</p> | <p>1. Tersedianya data/informasi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah</p> <p>2. Terwujudnya kapasitas aparatur perencana dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan akuntabel</p> |
| | <p>2. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dalam</p> | <p>1. Terwujudnya aparatur yang</p> |

pengelolaan kelembagaan dan administrasi pemerintahan yang professional, bersih dan berwibawa.

3. Peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat dan meningkatnya jaminan kehidupan masyarakat yang berkeadilan, aman dan bermartabat.

2 MISI KEDUA

PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA, PENINGKATAN PENDAPATAN DAN TENINGKATAN INISIATIF SERTA PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM KEGIATAN EKONOMI UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN YANG BERKELANJUTAN.

1. Peningkatan SDM pelaku usaha ekonomi di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.
2. Termotivasinya masyarakat untuk aktif dalam menangkap peluang penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan
3. Terwujudnya peningkatan produktifitas lahan garapan petani untuk kultivasi tanaman berumur pendek
4. Tersedianya air pada musim kemarau untuk pengembangan tanaman hortikultura.

trampil dan profesional

1. Pembentukan produk hukum tentang SPM dan SPP.
2. Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP)

1. Ratio jumlah penduduk pencari kerja dengan lapangan usaha.

1. Rasio jumlah angkatan kerja dengan lapangan usaha

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat.
2. Terciptanya iklim usaha dan investasi

1. Meningkatnya Produksi Pertanian.

- | | |
|--|--|
| <p>5. Terwujudnya peningkatan produktifitas padi sawah dengan sistem irigasi terpadu</p> | |
| <p>6. Terwujudnya Kabupaten Sabu Raijua sebagai penghasil bawang merah dan kacang hijau yang bernilai unggul dalam kuantitas dan kualitasnya</p> | <p>1. Tersedianya Jaringan Irigasi terpadu 2. Terciptanya lapangan usaha bagi masyarakat miskin 3. Terbentuknya Kebun Ryt Mandiri.</p> |
| <p>7. Terwujudnya peningkatan produksi hasil laut dan perikanan</p> | <p>1. Terkelolanya Potensi Laut secara maksimal.</p> |
| <p>8. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja melalui Perusahaan Daerah dan menjalin kerjasama dengan investor</p> | <p>1. Terbentuknya Perusahaan Daerah dengan berorientasi pengembangan potensi lokal</p> |
| <p>9. Membentuk system regulasi perijinan usaha yang merangsang pertumbuhan usaha ekonomi rakyat.</p> | <p>1. Pembentukan dan penerapan produk hukum tentang perijinan satu atap</p> |
| <p>10. Membentuk system regulasi perijinan usaha yang merangsang pertumbuhan usaha ekonomi rakyat.</p> | <p>2. Tersedianya kantor perijinan satu atap.</p> |
| <p>11. Meningkatkan peran kelembagaan non perbankan dan perbankan dalam memacu pertumbuhan usaha ekonomi rakyat.</p> | <p>1. Jumlah Kelembagaan Perbankan dan Non Perbankan yang tersedia.</p> |

3 MISI KETIGA
PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN DERAJAD
KESEHATAN MASYARAKAT

- | | |
|--|--|
| <p>1. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan Kesehatan.</p> | <p>1. Jumlah Tenaga kesehatan 2. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan</p> |
|--|--|

2. Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi

1. Menurunya Angka Kematian Ibu dan angka Kematian Bayi

4 MISI KEEMPAT

MENINGKATKAN DAN MERATAKAN KESEMPATAN UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN.

1. Meningkatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak usia dini dan usia sekolah.

1. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah.

2. Meningkatkan kualitas & jumlah Tenaga Pendidik.

1. Jumlah dan Mutu Tenaga Pendidik

3. Meningkatkan mutu pendidikan.

1. Pembentukan dan Penerapan Sistem Manajemen Pendidikan

4. Meningkatkan prosentase kelulusan siswa dari semua strata pendidikan.

1. Prosentase kelulusan siswa dari semua strata pendidikan.

5 MISI KELIMA

PENINGKATAN KESEJAHTERAN YANG BERKELANJUTAN BAGI MASYARAKAT SABU RAIJUA.

1. Peningkatan taraf hidup secara kontinyu terutama masyarakat miskin.

1. Jumlah Fasilitas Pemukiman Masyarakat Kurang Mampu

2. Terlatih, terdidik dan terbinanya SDM kreatif inovatif dan kompetitif

1. Presentase Keluarga Miskin

3. Pemanfaatan Sumber Daya alam ramah lingkungan

1. Menurunnya Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup

6. **MISI KEENAM**

MEMBANGUN DAN MEMELIHARA INFRASTRUKTUR UNTUK MENUNJANG PEM-BANGUNAN

1. Meningkatkan kapasitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, saluran irigasi dan dam penangkap air hujan.

2. Meningkatkan fasilitas dan frekuensi perhubungan laut dan udara Sabu Raijua dengan kabupaten lainnya di NTT.

3. Meningkatkan jumlah air hujan yang tertampung dalam cek dam untuk pengembangan Tanaman Holtikultura.

4. Pemanfaatan kemungkinan eksploitasi air bawah tanah untuk supply air minum dan pengairan.

5. Supply listrik tenaga angin, matahari dan arus laut untuk melayani kota dan desa terpencil.

1. Tersedianya infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, saluran irigasi dan dam penangkap air hujan.

1. Tersedianya fasilitas dan frekuensi perhubungan laut dan udara Sabu Raijua dengan kabupaten lainnya di NTT.

1. Tersedianya fasilitas untuk pengembangan tanaman holtikultura

1. Tersedianya Fasilitas Air Bersih

2. Ketersediaan fasilitas energy pembangkit listrik

7. **MISI KETUJUH**

MENATA RUANG WILAYAH PULAU SABU DAN RAIJUA UNTUK MENJADI PEDOMAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG TEPAT SASARAN DAN TEPAT GUNA, DAN MEMBANGUN TATARUANG KOTA YANG MODERN DAN ASRI

1. Menata ruang wilayah Pulau Sabu dan Pulau

1. Pen.bentukan Peraturan

Raijua untuk pembangunan wilayah yang tepat sasaran, tepat lingkungan dan tepat guna.

2. Menata ruang kota Ibukota Kabupaten dan Kecamatan agar sesuai dengan kondisi wilayah kota dan pengembargannya untuk berbagai kepentingan, kebutuhan dan kemajuan di masa depan.

3. Menghijaukan wilayah Sabu Raijua untuk memperbaiki kondisi lahan dan perubahan iklim dalam jangka panjang.

Daerah tentang RTRW

2. Penerapan Peraturan Daerah tentang (RTRW)

3. Jumlah Kasus dan Pelanggaran (RTRW) yang diatasi

4. Meningkatnya Luas Kawasan Hutan

8 MISI KEDELAPAN

PENGEMBANGAN SENI BUDAYA LOKAL DAN PROMOSI PARIWISATA

1. Melestarikan Nilai dan Seni Budaya lokal Sabu Raijua sebagai warisan leluhur.

2. Menjadikan Sabu Raijua sebagai daerah wisata budaya dan wisata bahari.

1. Pelestarian Nilai Budaya

2. Tingginya Kesadaran Masyarakat terhadap warisan Budaya.

1. Jumlah Kunjungan Wisata

2. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG JURUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMANGUNAN DAERAH | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|--------|---|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1.2.1. | Angka partisipasi sekolah | | | | | | | |
| 1.2.2. | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah | | | | | | | |
| 1.2.3 | Data | | | | | | | |
| 2 | Rehabilitasi | | | | | | | |
| 2.1 | Rasio posyandu per satuan balita | | | | | | | |
| 2.2 | Rasio puskesmas poliklinik, puskesmas per satuan kecamatan | | | | | | | |
| 2.3 | Data | | | | | | | |
| 2.4 | Data | | | | | | | |
| 3.1 | Data | | | | | | | |
| | Pelayanan Urusan Pilihan | | | | | | | |
| 1. | Pertanian | | | | | | | |
| 1.1 | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal tanahnya per hektar | | | | | | | |
| 1.2. | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB | | | | | | | |
| 2. | Rehabilitasi | | | | | | | |
| 2.1. | Rehabilitasi hutan dan lain-lain kritis | | | | | | | |
| 2.2. | Kerusakan Kawasan Hutan | | | | | | | |
| 2.3 | Data | | | | | | | |
| 3 | Data | | | | | | | |
| 3.1 | Data | | | | | | | |
| | PELAYANAN DAERAH | | | | | | | |
| | Kemampuan Ekonomi | | | | | | | |
| 1. | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | |
| 1.1. | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita | | | | | | | |
| 1.2. | Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita | | | | | | | |

| No. | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|------|---|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | Thn 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1.3 | Infrastruktur dalam daerah | | | | | | | |
| 1.4 | ... | | | | | | | |
| 2 | Perumahan | | | | | | | |
| 2.1 | Perumahan rakyat | | | | | | | |
| | Kelembagaan dan Infrastruktur | | | | | | | |
| 1. | Perhubungan | | | | | | | |
| 1.1. | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | | | | | | | |
| 1.2. | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | | | | | | | |
| 1.3. | ... | | | | | | | |
| 2. | Penataan Ruang | | | | | | | |
| 2.1 | Ketaatan terhadap RTPW | | | | | | | |
| 2.2 | Luas wilayah produktif | | | | | | | |
| 2.3 | ... | | | | | | | |
| 3 | ... | | | | | | | |
| 3.1 | ... | | | | | | | |

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sabu Raijua tahun 2011-2016 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sabu Raijua, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Sabu Raijua tahun 2011-2016.

RPJMD Kabupaten Sabu Raijua tahun 2011-2016 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua untuk tahun 2011-2016. Proses menuju tingkat hidup yang lebih baik atau lebih sejahtera itu merupakan suatu proses perubahan sosial seperti kebiasaan, budaya, semangat juang, nilai-nilai, persepsi terhadap perubahan perilaku sosial ekonomis dan perubahan fenomena lainnya. Perubahan sosial seperti ini tak dapat dilakukan sepenuhnya dalam skala waktu lima tahunan. Artinya dengan selesainya implementasi RPJMD 2011-2016 maka selesailah semua upaya persiapan dan semua masyarakat atau penduduk Sabu Raijua "*will be ready to get rich*".

1. Pedoman Transisi

Pedoman masa transisi bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD Kabupaten Sabu Raijua dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Bupati-wakil Bupati terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

Dalam implementasi program transisi ini, diperlukan komitmen dari semua unsur pemerintahan (*governance*) meliputi legislatif, eksekutif serta masyarakat dan pelaku pasar untuk saling bersinergi. Untuk menjaga kesinambungan program antar RPJMD maka beberapa masalah yang perlu diperhatikan adalah:

- (1). Masalah pembangunan sesuai dengan RPJMD/Renstra/RKT yang tidak atau belum terselesaikan atau sementara dalam proses penyelesaian sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode yang lalu perlu dilanjutkan/diselesaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati periode berikutnya.
- (2). Semua SKPD bertanggungjawab untuk menyelesaikan program pembangunan yang belum terselesaikan atau dalam proses penyelesaian sesuai dengan indikator kinerja masing-masing.

- (3). Mutasi pejabat SKPD yang akan dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati periode berikut hendaknya memperhatikan keberlanjutan dan keberhasilan program pembangunan yang sementara berjalan.

2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin terciptanya tata pemerintahan (*governance*) yang baik, khususnya untuk mengurangi tumpang tindih (*overlapping*) pelaksanaan antar program, maka dibutuhkan kaidah pelaksanaan. Selain itu, tujuan adanya kaidah ini adalah untuk menjamin keberlanjutan program yang dilakukan. Dengan tata pemerintahan yang baik, diharapkan implementasi program menjadi lebih terukur dampaknya.

(1). RPJMD merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD

Dokumen RPJMD Kabupaten Sabu Raijua yang disusun mulai Tahun 2011–2016 merupakan penerjemahan visi dan misi Bupati terpilih. Dengan demikian setelah dokumen ini tersusun dan disahkan dengan Peraturan Daerah, maka dokumen ini perlu diterjemahkan dalam kegiatan–kegiatan yang akan dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah. Walaupun demikian perlu ditegaskan, bahwa satuan kerja yang ada diharapkan dapat bekerja dengan prinsip–prinsip efektifitas dan efisiensi. Dengan SKPD yang selalu mengacu kepada RPJMD, maka tata pemerintahan yang baik (efisiensi dan efektifitas) akan mudah tercipta. Semua SKPD Kabupaten Sabu Raijua wajib menyusun program prioritas untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJMD

(2). RPJMD Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan RKPD

Sebagaimana dijelaskan di atas, RPJMD merupakan pedoman untuk penyusunan program–program dan kegiatan tahunan. Untuk itu, kegiatan–kegiatan yang diusulkan dalam RKPD harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan RPJMD. Dengan kata lain, penetapan prioritas program dan kegiatan akan muncul dalam RKPD yang diusulkan baik oleh eksekutif maupun legislatif. Dalam RPJMD, program–program yang ditawarkan memiliki dimensi umum dan masih perlu diterjemahkan dalam kegiatan–kegiatan riil. Setelah kegiatan riil dijadwalkan dalam RKPD, maka pembiayaan dapat disusun. Dengan menggunakan prinsip “*money follows function*” maka kegiatan–kegiatan yang diusulkan akan memunculkan pembiayaan.

Sumber pembiayaan yang ada saat ini masih berasal dari pemerintah (APBD). Dengan sumber pembiayaan hanya dari APBD yang terbatas, berdampak pada pilihan–pilihan kegiatan yang diusulkan. Untuk itu di masa mendatang pembiayaan dari pihak ketiga, yakni swasta maupun masyarakat (*public-private partnership*), perlu digali dan dimanfaatkan. Dengan semakin banyaknya alternatif sumber–sumber pembiayaan, maka kegiatan yang diusulkan akan semakin besar cakupan dan area/luasan programnya.

3. Penguatan peran para *stakeholders*/pelaku dalam pelaksanaan RPJMD

Sebagaimana dijelaskan di atas, RPJMD ini disusun dengan menggunakan proses partisipasi publik, di mana hasil kerja tim penyusun RPJMD Kabupaten Sabu Raijua yang berkoordinasi dengan Dappeda Kabupaten Sabu Raijua ini disosialisasikan kepada *stakeholders* baik dari kalangan perguruan tinggi, LSM maupun masyarakat. Setelah adanya masukan dan kritik, perbaikan laporan dilakukan dengan menghadirkan beberapa pakar untuk penajaman konsep.

Setelah itu, dokumen RPJMD ini disosialisasikan kembali kepada masyarakat (*stakeholders*) dan masukan masyarakat diterjemahkan kembali dalam program-program yang diusulkan. Melalui beberapa proses tersebut, diharapkan terjadi proses penguatan *stakeholders*. *Stakeholders* yang kuat, akan mendorong proses penyusunan program yang transparan, munculnya kesadaran mengawasi proses penyusunan dan implementasi program (*safe guarding*). Dengan demikian, *stakeholders* yang kuat akan mendorong demokratisasi dan tentunya hal ini akan menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan. Lembaga eksekutif dan Legislatif Kabupaten Sabu Raijua dengan dukungan semua *stakeholders*, dunia usaha dan masyarakat wajib untuk mengupayakan secara optimal pencapaian tujuan, sasaran, arah dan kebijakan pembangunan Sabu Raijua sesuai dengan RPJMD selama lima tahun ke depan.

4. Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan.

Dengan adanya dokumen RPJMD ini, akan sangat membantu kepala daerah untuk melihat sejauh mana capaian dari kebijakan yang sudah dilakukan serta penerjemahan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugas pemerintahannya Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua wajib untuk mengerahkan semua potensi, kekuatan dan sumberdaya daerah untuk mencapai tujuan RPJMD Sabu Raijua Tahun 2011-2016.

Dengan adanya pandangan tersebut, diharapkan RPJMD ini menunjukkan indikator-indikator yang jelas dan terukur agar diperoleh cara yang mudah untuk melihat keberhasilan pemimpin kepala daerah. RPJMD ini juga akan menjadi acuan bagi RKPD yang merupakan kegiatan pokok tahunan. Dengan demikian kepala daerah nantinya akan mampu melihat tingkat keberhasilan yang dicapai dari indikator kinerja tahunan maupun lima tahunan yang sudah ada dalam RPJMD.

BAB XI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 - 2016 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. RPJMD ini merupakan pedoman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Dewan Perwakilan Rakyat, masyarakat dan faktor lainnya yang turut terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun kedepan. RPJMD ini juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya selama periode tersebut.

Untuk mewujudkan visi Kabupater. Sabu Raijua "**Menjadikan Sabu Raijua, kabupaten yang inovatif, maju dan bermartabat**" maka perlu didukung oleh (1). Komitmen dari kepemimpinan daerah yang berakhlak mulia, kapabel, berkualitas dan demokratis, (2). Good governance dan clean government, (3). Konsistensi kebijakan pemerintah daerah, (4) Berberpihakan kepada rakyat, (5) Partisipasi aktif dari masyarakat, media massa, dan pihak swasta serta (6) Mekanisme kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas publik yang baik.

Untuk itu, dukungan dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan di Kabupaten Sabu Raijua diharapkan akan membawa masyarakat Kabupaten Sabu Raijua menuju citta-cita: maju, mandiri, inovatif, bermartabat dan sejahtera sebagai mana yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2011-2016.

BUPATI SABU RAIJUA

IR. M. L. DIRA TOME

Tabel 8.1
Lampiran RPJMD KABUPATEN SABURAIJUA 2011-2016

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan | Indikator Kinerja Program Outcome | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | SKPD Penanggungjawab | |
|------|--|--|--|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--|---------------|----------------------|--|
| | | | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | | |
| | | | | Target | Rp (djm juta) | Target | Rp (djm juta) | Target | Rp (djm juta) | Target | Rp (djm juta) | Target | Rp (djm juta) | Target | Rp (djm juta) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 15 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Meningkatnya angka partisipasi kasar TK/PAUD dari 12,5 % di tahun 2010 menjadi minimal 20 % di tahun 2015 | 12,5% | 400 | 14,5% | 440 | 16,5% | 484 | 18,5% | 532 | 20% | 586 | 20% | | | Dinas Pendidikan, kebudayaan, Pemuda & Olahraga |
| 1 | 16 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Meningkatnya angka partisipasi murni SD dari 95 % di tahun 2010, menjadi 99 % di tahun 2015 | 95% | 400 | 97% | 440 | 98% | 484 | 99% | 532 | 99% | 586 | 99% | | | Dinas Pendidikan, kebudayaan, Pemuda & Olah Raga |
| 1 | 18 | Program Pendidikan Non Formal | Terselenggaranya pendidikan luar sekolah, yang memungkinkan terjadinya penurunan prosentase buta huruf, yang pada tahun 2010 sebesar 4,1% menjadi 5% di tahun 2015 | 10% | 330 | 9% | 330 | 7% | 361 | 6% | 399 | 5% | 439 | 5% | | | Dinas Pendidikan, kebudayaan, Pemuda & Olah Raga |
| 1 | 19 | Program Pendidikan Luar Biasa | Tersedianya sekolah pendidikan luar biasa 1 unit | 0 | 0 | 0 | 1 unit | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Dinas Pendidikan, kebudayaan, Pemuda & Olah Raga |
| 1 | 20 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Meningkatnya prosentase guru SMP/MTs yang berpendidikan S-1, dari 20 % di tahun 2010, menjadi 30 % di tahun 2015 | 20% | 200 | 25% | 220 | 30% | 242 | 35% | 266 | 40% | 293 | 40% | | | Dinas Pendidikan, kebudayaan, Pemuda & Olah Raga |
| 1 | 22 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Meluasnya lembaga pendidikan anak usia dini dari 16 unit di tahun 2010 menjadi 20 unit tersebar di seluruh kecamatan di tahun 2015 | 16 Unit | 16 Unit | 17 Unit | 500 | 18 Unit | 550 | 19 Unit | 605 | 20 Unit | 660 | 20 Unit | | | Dinas Pendidikan, kebudayaan, Pemuda & Olah Raga |
| | Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Tersedianya buffer stock obat esensial, alat kesehatan dan pertukaran kesehatan lainnya | 20% | 770 | 40% | 847 | 45% | 932 | 50% | 1.025 | 20% | 1.127 | 20% | | | Dinas Kesehatan |
| 2 | 16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | prosentase peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dari 20% di tahun 2010 menjadi 70% di tahun 2015 | 20% | 130 | 30% | 130 | 50% | 361 | 60% | 394 | 70% | 439 | 70% | | | Dinas Kesehatan |
| 2 | 25 | Program pengembangan sarana dan prasarana kesehatan puskesmas, puskesmas pembantu, dan jaringannya | Meningkatkan jumlah sarana kesehatan dari 67 unit di tahun 2010 menjadi 73 unit di tahun 2015 | 67 unit | 67 unit | 73 unit | 440 | 73 unit | 484 | 77 unit | 532 | 77 unit | 586 | 77 unit | | | Dinas Kesehatan |

Tabel 8.1
Lampiran RPJMD KABUPATEN SABARUNGGA 2011-2016

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan | Indikator Kinerja Program Outcome | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2011) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | SKPD Penanggungjawab |
|------|--|--|-----------------------------------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|----------------------|
| | | | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (dim. juta) | Target | Rp (dim. juta) | Target | Rp (dim. juta) | Target | Rp (dim. juta) | Target | Rp (dim. juta) | Target | Rp (dim. juta) | |
| 2 | 32 | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | 57% | 60% | 200 | 65% | 220 | 70% | 242 | 75% | 266 | 80% | 293 | 80% | 322 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 32 | Program peningkatan pelayanan kesehatan | 10% | 20% | 2.000 | 30% | 2.200 | 40% | 2.420 | 50% | 2.662 | 60% | 2.928 | 75% | 3.221 | Umas Kesehatan |
| | | Pekerjaan Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 15 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 100% | 100% | 12.000 | 100% | 13.200 | 100% | 14.520 | 100% | 15.972 | 100% | 17.566 | 100% | 19.326 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 1 | 15 | Program rehabilitasi/pereliharaan Jalan dan Jembatan | 100% | 100% | 12.000 | 100% | 13.200 | 100% | 14.520 | 100% | 15.972 | 100% | 17.566 | 100% | 19.326 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 1 | 25 | Program penyediaan dan pengolahan air baku | 100% | 100% | 500 | 100% | 500 | 100% | 500 | 100% | 500 | 100% | 500 | 100% | 500 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 1 | 26 | Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya | 20% | 30% | 12.000 | 40% | 13.200 | 50% | 14.520 | 60% | 15.972 | 70% | 17.566 | 70% | 19.326 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 1 | 30 | Program pembangunan Infrastruktur perdesaan | 60% | 65% | 2.000 | 40% | 2.200 | 45% | 2.420 | 50% | 2.662 | 55% | 2.928 | 55% | 3.221 | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 17 | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | 100% | 100% | 500 | 70% | 550 | 70% | 600 | 70% | 660 | 80% | 712 | 80% | 800 | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 17 | Program Pengembangan Tata Ruang | 100% | 100% | 700 | 90% | 700 | 90% | 700 | 90% | 700 | 90% | 700 | 90% | 700 | Dinas Pekerjaan Umum |

Tabel 8.1
Lampiran RPJMD KABUPATEN SABURAJUA 2011-2016

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan | Indikator Kinerja Program Outcome | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | SKPD Penanggungjawab |
|----|---|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---------------|-------------------------------|
| | | | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp (dim juta) | Target | Rp (dim juta) | Target | Rp (dim juta) | Target | Rp (dim juta) | Target | Rp (dim juta) | Target | Rp (dim juta) | |
| 17 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Terwujudnya konsistensi pemanfaatan ruang dengan dokumen perencanaan | 90% | 90% | 150 | 90% | 165 | 90% | 182 | 90% | 200 | 90% | 220 | 90% | 242 | Bappeda |
| | Perencanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Program Pengembangan data/informasi | Tersedianya data/informasi kebutuhan perencanaan | 90% | 90% | 200 | 90% | 220 | 90% | 242 | 90% | 266 | 90% | 293 | 90% | 322 | Bappeda |
| 17 | Program Pengembangan Wilayah Perbatasan | Meningkatnya informasi kebijakan pemerintah dalam wilayah perbatasan antar negara | 90% | 90% | 200 | 90% | 220 | 90% | 242 | 90% | 266 | 90% | 293 | 90% | 322 | Bappeda |
| 20 | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | Terwujudnya kapasitas, aratur perencana dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan akuntabel | 90% | 90% | 200 | 90% | 220 | 90% | 242 | 90% | 266 | 90% | 293 | 90% | 322 | Bappeda |
| 22 | Program perencanaan pembangunan ekonomi | Tersusunnya master plan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah | 90% | 90% | 500 | 90% | 500 | 90% | 500 | 90% | 500 | 90% | 500 | 90% | 500 | Bappeda |
| | Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Meningkatnya prosentase jumlah prasarana dan sarana perhubungan | 40% | 45% | 2.000 | 50% | 2.200 | 55% | 2.420 | 60% | 2.662 | 65% | 2.926 | 70% | 3.202 | Idinas Perhubungan |
| | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup | Meningkatnya pelaksanaan AMDAL terhadap semua kegiatan pembangunan dan aktivitas lainnya yang menurut peraturan kegiatan dimaksud wajib AMDAL | 85% | 90% | 100 | 90% | 110 | 90% | 121 | 90% | 131 | 90% | 142 | 90% | 161 | Badan Lingkungan Hidup Daerah |
| 17 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Terwujudnya lingkungan konservasi sumber daya alam yang mendukung ekowisata | 85% | 90% | 200 | 90% | 220 | 90% | 242 | 90% | 266 | 90% | 293 | 90% | 322 | Badan Lingkungan Hidup Daerah |
| | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat | Terwujudnya penyuluhan kesehatan ibu dan bayi di kelompok masyarakat | 70% | 85% | 250 | 85% | 275 | 85% | 301 | 85% | 331 | 85% | 361 | 85% | 401 | Disdik Kesehatan |
| | Sosial | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Program Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Adat Terpencil (MAMAT) dan Pendamping Masyarakat Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Meningkatnya kemampuan dan keterampilan berusaha dari 20% tahun 2010 menjadi 22,4% di tahun 2011 bagi 32,6% keluarga miskin di Saburajua | 20% | 22,4% | 770 | 22,2% | 770 | 22,2% | 847 | 22,2% | 924 | 22,2% | 1.001 | 22,2% | 1.127 | Disdik Sosial |

Tabel 8.1
Lampiran RPJMD KABUPATEN SABURAJUA 2011-2016

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan | Indikator Kinerja Program Outcome | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | SKPD Penanggungjawab | | |
|------|--|---|-----------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | |
| | | | | Target | Rp (djm juta) | Target | Rp (djm juta) | Target | Rp (djm juta) | Target | Rp (djm juta) | Target | Rp (djm juta) | | Target | Rp (djm juta) |
| 13 | 21 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 25% | 30% | 400 | 35% | 440 | 40% | 484 | 45% | 532 | 50% | 586 | 55% | 644 | Dinas Sosial |
| 14 | | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 15 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 30% | 40% | 1.000 | 50% | 1.100 | 60% | 1.210 | 70% | 1.331 | 80% | 1.464 | 80% | 1.611 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 14 | 16 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 40% | 55% | 800 | 50% | 880 | 55% | 969 | 60% | 1.065 | 65% | 1.171 | 65% | 1.288 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 15 | | Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif | 40% | 45% | 1.500 | 50% | 1.650 | 55% | 1.782 | 60% | 1.942 | 65% | 2.116 | 70% | 2.306 | Dinas Koperasi dan UKM |
| 15 | 17 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 30% | 40% | 1.000 | 50% | 1.100 | 60% | 1.210 | 70% | 1.331 | 80% | 1.464 | 80% | 1.611 | Dinas Koperasi dan UKM |
| 16 | | Penanaman Modal Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 15 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 30% | 40% | 100 | 50% | 110 | 60% | 121 | 70% | 133 | 80% | 146 | 80% | 161 | Dinas Perdag dan Penanaman Modal |
| 16 | 20 | Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 30% | 40% | 150 | 50% | 165 | 60% | 181 | 70% | 200 | 80% | 216 | 80% | 231 | Dinas Perdag dan Penanaman Modal |
| 17 | | Budaya dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 21 | Program Pengembangan Nilai Budaya | 70% | 75% | 500 | 80% | 550 | 85% | 605 | 90% | 666 | 95% | 723 | 95% | 784 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

Tabel B.1
Lampiran RPJMD KABUPATEN SABURAIJUA 2011-2016

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan | Indikator Kinerja Program Outcome | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | SKPD Penanggungjawab | |
|----|--|---|---|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---------------|----------------------|--|
| | | | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | | |
| | | | | Target | Rp (dim juta) | Target | Rp (dim juta) | Target | Rp (dim juta) | Target | Rp (dim juta) | Target | Rp (dim juta) | Target | Rp (dim juta) | | |
| 7 | 16 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Terwujudnya pengelolaan dan promosi kekayaan budaya lokal daerah dari 30% di tahun 2010 menjadi 80% di tahun 2015 | 30% | 40% | 500 | 50% | 550 | 60% | 605 | 70% | 666 | 80% | 732 | 80% | 805 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 3 | | Pemuda dan Olah Raga | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 17 | Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda | Terwujudnya jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda dari 30% di tahun 2010 menjadi 80% di tahun 2015 | 30% | 40% | 400 | 50% | 440 | 60% | 484 | 70% | 532 | 80% | 586 | 80% | 644 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olah Raga |
| 3 | | Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Terlaksananya pembangunan kantor bupati, kantor DPRD dan kantor dinas pemerintahan Kabupaten Saburajua | 65% | 85% | 50,000 | 90% | 50,000 | 75% | 50,000 | 90% | 50,000 | 95% | 50,000 | 95% | 50,000 | Sekretariat Daerah |
| 3 | 25 | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | Terwujudnya Pelan Pembangunan yang berkualitas dari 30% di tahun 2010 menjadi 80% di tahun 2015 | 30% | 40% | 500 | 50% | 550 | 60% | 605 | 70% | 666 | 80% | 732 | 80% | 805 | Sekretariat Daerah |
| 3 | | Kepegawalan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 16 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Terwujudnya aparatur yang terampil dan profesional dari 30% di tahun 2010 menjadi 80% di tahun 2015 | 30% | 40% | 400 | 50% | 440 | 60% | 484 | 70% | 532 | 80% | 586 | 80% | 644 | Sekretariat Daerah |
| 2 | | Perberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | Meningkatnya ketrampilan usaha budidaya tanaman perikanan dari 30% di tahun 2010 menjadi 80% di tahun 2015 | 30% | 40% | 500 | 50% | 550 | 60% | 605 | 70% | 666 | 80% | 732 | 80% | 805 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan |
| 2 | | Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | Program Peningkatan Ketrampilan Masyarakat dan Pertanian | Meningkatnya ketrampilan masyarakat dan pertanian dari 30% di tahun 2010 menjadi 80% di tahun 2015 | 30% | 40% | 1,000 | 50% | 1,100 | 60% | 1,210 | 70% | 1,330 | 80% | 1,460 | 80% | 1,600 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan |

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan | Indikator Kinerja Program Outcome | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | SKPD Penanggungjawab | | |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|--|---|
| | | | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | |
| | | | | Target | Rp (dim Juta) | Target | Rp (dim Juta) | Target | Rp (dim Juta) | Target | Rp (dim Juta) | Target | Rp (dim Juta) | | Target | Rp (dim Juta) |
| 16 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan | Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan pertanian dari 30% di tahun 2010 menjadi 80% di tahun 2015 | 30% | 40% | 1.500 | 50% | 1.650 | 60% | 1.815 | 70% | 1.997 | 80% | 2.196 | 80% | 2.416 | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan |
| 18 | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | Terwujudnya sistem pertanian terpadu dari 30% di tahun 2010 menjadi 80% di tahun 2015 | 30% | 40% | 1.500 | 50% | 1.650 | 60% | 1.815 | 70% | 1.997 | 80% | 2.196 | 80% | 2.416 | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan |
| 22 | Program peningkatan produksi hasil peternakan | Meningkatnya prosentase produktivitas peternakan unggulan dari 30% di tahun 2010 menjadi 80% di tahun 2015 | 30% | 40% | 1.000 | 50% | 1.100 | 60% | 1.210 | 70% | 1.331 | 80% | 1.464 | 80% | 1.611 | Dinas Peternakan |
| Kehutanan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Program rehabilitasi hutan dan lahan | Meningkatnya luas kawasan reboisasi dan penghijauan hutan di Kabupaten Sabu Raga minimal 30% | 15% | 10% | 1.000 | 15% | 1.100 | 20% | 1.210 | 25% | 1.331 | 30% | 1.464 | 30% | 1.611 | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan |
| Energi dan Sumberdaya Mineral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan | Terpantauanya pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi merusak kelestarian lingkungan | 80% | 90% | 250 | 90% | 275 | 90% | 303 | 90% | 333 | 90% | 366 | 90% | 401 | Dinas Pertambangan & Energi |
| Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Program pembudayaan ekonomi masyarakat pesisir | Terbinanya kelompok ekonomi masyarakat pesisir dari 30% di tahun 2010 menjadi 80% di tahun 2015 | 30% | 40% | 1.000 | 40% | 1.100 | 50% | 1.210 | 40% | 1.331 | 40% | 1.464 | 40% | 1.611 | Dinas Kelautan & Perikanan |
| 21 | Program pengembangan perikanan tangkap | Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dari 65% di tahun 2010 menjadi 90% di tahun 2015 | 65% | 70% | 500 | 75% | 550 | 80% | 605 | 85% | 666 | 90% | 732 | 90% | 805 | Dinas Kelautan & Perikanan |
| Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | Terwujudnya standar kualitas produk-produk unggulan dari 40% di tahun 2010 menjadi 80% di tahun 2015 | 40% | 50% | 500 | 50% | 550 | 60% | 605 | 70% | 666 | 80% | 732 | 80% | 805 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| Peradilan | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan | Indikator Kinerja Program Outcome | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010) | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | SKPD Penanggungjawab | |
|--|---|-----------------------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--|----------------------|---|
| | | | Target | Rp (dim. juta) | Target | Rp (dim. juta) | Target | Rp (dim. juta) | Target | Rp (dim. juta) | Target | Rp (dim. juta) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Terwujudnya kerjasama kemitraan industri mikro, kecil, menengah dan swasta dari 40% di tahun 2010 menjadi 80% di tahun 2015 | 0% | 40% | 500 | 40% | 550 | 60% | 60% | 70% | 60% | 60% | 732 | 80% | 805 | Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal |
| | | | 112,400 | | 112,200 | | 122,500 | | 130,000 | | 142,150 | | 144,818 | | |